



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VII DPR RI DENGAN KEPALA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (BRIN), KEPALA BADAN
INFORMASI GEOSPASIAL (BIG), KEPALA BADAN PENGAWAS
TENAGA NUKLIR (BAPETEN)**

- Tahun Sidang : 2022-2023
Masa Persidangan : I
Rapat ke- : 9 (Sembilan)
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Kamis, 25 Agustus 2022
Waktu : Pukul 10.30 WIB s.d. 13.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Gedung Nusantara
1, Jakarta
Ketua Rapat : Dony Maryadi Oekon (F-PDI Perjuangan/ Wakil
Ketua Komisi VII DPR RI).
Sekretaris Rapat : Dra. Nanik Herry Murti/Kabagset. Komisi VII DPR RI
Acara : 1. Pembahasan LKPP APBN Tahun Anggaran
2021 (RUU tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021);
2. Progres pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran
2022.
Hadir : 33 orang Anggota hadir dari 52 orang Anggota
Komisi VII DPR RI dengan rincian sebagai berikut:

A. Anggota DPR RI:

PIMPINAN :

1. Dony Maryadi Oekon/F-PDI Perjuangan/ Wakil
Ketua Komisi VII DPR RI.

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

9 orang anggota dari 11 anggota:

1. H. Yulian Gunhar, S.H, M.H.
2. H. Nasyirul Falah Amru, S.E.
3. H. Andi Ridwan Wittiri, S.H.

4. Mercy Chriesty Barends, S.T.
5. Dr. Ir. Willy Midel Yoseph, M.M.
6. Paramitha Widya Kusuma, S.E.
7. Ismail Thomas, S.H, M.Si
8. Ribka Tjiptaning Ploretariyanti.
9. Bambang DH.

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:

6 orang anggota dari 7 anggota:

1. Ir. H. M. Ridwan Hisyam.
2. Drs. H.M. Gandung Pardiman, M.M.
3. Drs. Mukhtarudin.
4. Ir. Lamhot Sinaga.
5. Bambang Hermanto, S.E.
6. Dyah Roro Esti Widya Putri, B.A, M.Sc.

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:

4 orang anggota dari 6 anggota:

1. R. Wulansari.
2. Ramson Siagian
3. Katherine A. Oendoen .
4. Iwan Kurniawan, S.H.

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

3 orang anggota dari 4 anggota:

1. Ina Elisabeth Kobak, S.T.
2. Arkanata Akram, S.T., B.E. (Hons) M.Eng.Sc.
3. Rico Sia.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

2 orang anggota dari 5 anggota:

1. Hj. Ratna Juwita Sari, S.E, M.M.
2. H. Marwan Ja'far.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

3 orang anggota dari 5 anggota:

1. Zulfikar Hamonangan, S.H.
2. Rusda Mahmud.
3. Drs. Hendrik H. Sitompul, M.M.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

3 orang anggota dari 5 anggota:

1. H. Rofik Hananto, S.E.
2. Dr. H. Mulyanto, M. Eng.
3. Dipl. Ing Hj. Diah Nurwitasari, MI.Pol.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

3 orang anggota dari 3 anggota:

1. Dr. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M. Sc.
2. H. Asman Abnur, S.E., M.Si.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

0 orang anggota dari 1 anggota:

B. PEMERINTAH/UNDANGAN

1. Dr. Laksana Tri Handoko, M.Sc (Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional)
2. Muh. Aris Rifai (Kepala Badan Informasi Geospasial)
3. Sugeng Sumbarjo (Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir)

JALANNYA RAPAT :

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Apa bisa kita mulai?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi VII DPR RI,
Yang kami hormati Bapak, Ibu anggota Komisi VII DPR RI,
Yang kami hormati Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN beserta jajarannya,
Yang kami hormati Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau BAPETEN beserta jajarannya,
Yang kami hormati Kepala Badan Informasi Geospasial atau BIG beserta jajarannya, serta
Hadirin sekalian.

Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan Rapat Dengar Pendapat guna melaksanakan tugas-tugas konstitusional kita.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas perhatian serta kesediaan Bapak, Ibu anggota Komisi VII DPR RI untuk mengikuti Rapat Dengar Pendapat hari ini.

Sesuai undangan yang telah disampaikan, berdasarkan jadwal rapat Komisi VII DPR RI pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023, maka pada hari ini Komisi VII DPR RI akan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BRIN, Kepala BAPETEN dan Kepala BIG dalam rangka pelaksanaan fungsi anggaran dengan agenda, ini mohon izin hari ini kita ada dua agenda, agenda pertama adalah pembahasan laporan keuangan pemerintah pusat APBN Tahun Anggaran 2021. Kemudian nanti siang

rencananya kita akan dilanjut dengan progres pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2022.

Untuk menyingkat waktu, saya mohon izin kepada rekan-rekan anggota dan Bapak/Bapak semua, Bapak/Ibu semua, kita akan satukan ini supaya lebih efisien kita akan satukan jadi dipresentasikan apa yang pertama tentang 2021, yang kedua langsung kepada progres tahun 2022. Kesimpulan rapat nanti ada dua.

Jadi saya mohon izin kita langungkan ini, Pak. Jadi presentasi 2 kali, kemudian nanti baru kita pendalaman tinggal disampaikan nanti, kan sebetulnya ada yang dialami 2021 dan 2022. Jadi kita satuin aja tapi nanti kita lihat mana yang mau masuk.

F – PKS (Dr. H. MULYANTO, M.Eng.):

Seperti rapat SDM kemarin ya, Pak?

**KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI
PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Iya. Jadi kita ada dua kesimpulan. Apa dapat disetujui?

F – PKS (Dr. H. MULYANTO, M.Eng.):

Setuju.

**KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI
PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

(RAPAT: SETUJU)

Terima kasih.

Dengan ini agenda yang pertama adalah pembahasan laporan keuangan pemerintah pusat APBN Tahun Anggaran 2021. Yang kedua adalah progres pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan data dari sekretariat, anggota Komisi VII DPR RI yang telah hadir berjumlah 19 anggota dari 52 anggota Komisi VII yang terdiri atas 7 Fraksi dari 9 Fraksi yang ada dan demikian kuorum sebagaimana ditentukan dalam peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib Pasal 281 Ayat (1) telah terpenuhi dan sesuai ketentuan Pasal 276 Ayat (1) menyatakan bahwa, setiap rapat DPR bersifat terbuka kecuali dinyatakan tertutup. Oleh karena itu Pimpinan meminta persetujuan anggota agar rapat ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan dan bersifat terbuka, apakah dapat disetujui?



F – PKS (Dr. H. MULYANTO, M.Eng.):

Setuju.

**KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI
PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Atas persetujuan anggota dan dengan mengucapkan “*bismillahirrahmanirrahim*” Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT: TERBUKA)
(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.30 WIB)**

Sebelum melanjutkan rapat ini, kami meminta persetujuan Bapak/Ibu anggota Komisi VII DPR RI bahwa rapat ini selesai pada pukul 12.45 atau lebih kurang 20, 2 jam *sorry* 2 jam setelah rapat dimulai dan dapat diperpanjang lagi dengan kesepakatan bersama, apa dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat LKPP tahun 2021, BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian atau WDP atas laporan keuangan BRIN, sedangkan untuk laporan keuangan BAPETEN dan BIG, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Atas laporan ini Komisi VII DPR RI memohon penjelasan atas capaian kinerja keuangan tahun 2021 untuk masing-masing mitra khususnya BRIN, karena di tahun-tahun sebelumnya mendapatkan opini WTP.

Selanjutnya, Komisi VII DPR RI juga mendapatkan laporan beberapa temuan BPK yang perlu mendapatkan perhatian khusus terhadap beberapa LPNK yang telah terintegrasi dalam BRIN antara lain:

1. Kelebihan pembayaran atas paket pekerjaan pembangunan gedung pusat data nasional ekosistem, pesisir laboratorium dan peluang kerja pusat oseanografi, LIPI bertingkat 8 sebesar Rp21.758.096;
2. Penatausahaan peralatan dan mesin sebesar Rp75.288.556.449 pada LIPI belum optimal;
3. Aset LIPI yang dikelola dan digunakan oleh pihak ketiga yang belum didukung dengan dokumen pemindahtanganan masih tercatat di neraca sebesar Rp131.876.163.942;
4. Kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp41.718.500 pada 8 paket pekerjaan belanja barang pemeliharaan di Batam;
5. Belanja obat untuk poliklinik pada Biro Sumber Daya Manusia Organisasi dan Hukum LAPAN sebesar Rp71.710.000 tidak sesuai kondisi senyatanya dan belum tercatat dalam persediaan.

Terkait dengan beberapa temuan dari BPK terhadap laporan keuangan BRIN, BAPETEN dan BIG, Komisi VII DPR RI juga meminta kepada Kepala

BRIN, Kepala BAPETEN dan Kepala BIG agar menindaklanjuti seluruh temuan tahun 2021 sesuai rekomendasi BPK.

Bapak dan Ibu yang saya hormati,

Untuk efektifnya waktu pembahasan, maka kami persilahkan Kepala BRIN, dilanjutkan dengan Kepala BAPETEN dan Kepala BIG untuk menyampaikan pemaparan dan penjelasan, kepada Kepala BRIN kami persilahkan.

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (Dr. LAKSANA TRI HANDOKO, M.Sc.):

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

Bapak, Ibu Pimpinan dan anggota Komisi VII yang kami hormati,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Shalom,
Om Swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan.

Mohon izin untuk menyampaikan laporan keuangan pemerintah pusat Tahun Anggaran 2021 di 5 entitas yang saat ini ada di BRIN.

Jadi yang pertama adalah untuk Kemenristek BRIN yang merupakan BA-042. Jadi seperti tadi disampaikan oleh Bapak Pimpinan, tahun ini itu kami WDP, wajar dengan pengecualian, khususnya dengan pembebanan pengeluaran yang kurang sesuai dengan mata anggaran dan pengelolaan bahan persediaan yang belum tercatat.

Untuk laporan keuangan BA-042 Tahun Anggaran 2021, realisasi itu sebesar 72,43%, ini realisasi yang cukup rendah dikarenakan adanya perubahan organisasi, sehingga banyak sebagian besar karena banyak belanja pegawai yang tidak terserap.

Kemudian, untuk ringkasan neraca. Jadi pada tahun anggaran 2021 ada peningkatan sedikit sebesar 0,21%. Untuk ringkasan laporan operasional, ya, untuk ringkasan laporan operasional pada BA-042 itu penyerapannya ada total 70,41% sedangkan untuk ringkasan laporan perubahan ekuitas itu ada peningkatan sedikit sebesar 0,44%.

Selanjutnya adalah terkait dengan tindak lanjut. Laporan hasil pemeriksaan BPK RI terhadap BA-042. Jadi untuk, untuk tahun ini kami baru saja menerima hasil laporan pemeriksaan tersebut pada tanggal 9 Agustus dan tentu kami akan segera menindaklanjuti dan masih dalam proses untuk

menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan dari BPK RI sebanyak 13 temuan dengan 29 rekomendasi.

Selanjutnya, untuk bagian anggaran DA-080 atas nama BATAN, jadi tahun ini WTP, wajar tanpa pengecualian dan ringkasan laporan realisasi anggaran untuk BA-08 mohon maaf 080 atas nama BATAN sebesar 75,35% untuk tahun anggaran 2021.

Kemudian, ringkasan neraca untuk tahun anggaran 2021 ada mengalami kenaikan sebesar 1,10% dan untuk ringkasan laporan operasional itu sebagaimana yang terlampir, dan untuk laporan perubahan ekuitas itu ada perubahan sebesar 1,15%, sedangkan sebagai tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK RI ini juga sama karena semua memang baru kami terima pada 9 Agustus yang lalu. Jadi ada 13 temuan untuk BA-080 dengan 26 jumlah, 26 rekomendasi dan saat ini dalam proses untuk melakukan tindak lanjut atas 26 rekomendasi dari BPK RI.

Untuk bagian anggaran 081 atas nama BPPT. Jadi tahun 2021 itu wajar tanpa pengecualian dengan ringkasan laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2021 sebesar 89,79% dengan ringkasan neraca mengalami kenaikan 1,24% dan untuk laporan operasional, belanja operasional itu sebesar 6,27%, sedangkan perubahan ekuitas itu sebesar, ada kenaikan 1,11%.

Terkait dengan tindak lanjut LKP BPK RI atas BA-801 atas nama BPPT, itu ada 15 temuan dengan 37 rekomendasi yang saat ini dalam proses ditindaklanjuti oleh tim kami.

Selanjutnya, untuk BA-082 atas nama LAPAN, tahun ini adalah wajar tanpa, mohon maaf, tahun lalu adalah wajar tanpa pengecualian dengan realisasi anggaran sebesar 71,37%, dengan ringkasan neraca mengalami kenaikan sebesar 2,19%, serta laporan operasional sebesar 13,42%. Untuk perubahan ekuitas juga mengalami sedikit kenaikan sebesar 1,56%.

Dari laporan hasil pemeriksaan BPK untuk BA di LAPAN itu ada 12 temuan dengan 22 rekomendasi yang saat ini juga masih dalam proses penindaklanjutan di tim kami.

Kemudian untuk BA-0710 eh 079 atas nama LIPI tahun lalu kami mengalami wajar dengan pengecualian, dimana realisasi anggaran sebesar 78,86% dan ringkasan neraca mengalami kenaikan sebesar 20,76% dan laporan operasional mengalami kenaikan 11,57% dengan perubahan ekuitas sebesar 20,82%. Dan dari hasil, laporan hasil pemeriksaan BPK RI di LIPI di BA-079 atas nama LIPI ada 14 temuan dengan 36 rekomendasi yang saat ini juga sedang dalam proses tindaklanjut di kami.

Demikian untuk laporan keuangan pemerintah pusat Tahun Anggaran 2021 yang terdiri dari 5 BA, yang saat ini semuanya di dalam BRIN.

Mohon izin, apakah melanjutkan yang.

**KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI
PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Ya, silahkan lanjut Pak.

**KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (Dr. LAKSANA TRI
HANDOKO, M.Sc.):**

Baik. Terima kasih, Pimpinan.

Jadi mohon izin untuk melanjutkan terkait progres pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2022 di BRIN.

Jadi pagu BRIN untuk Tahun Anggaran 2022 itu sebesar 5,861 T, dimana belanja operasional 2,637 T dan selain sumber pendanaannya selain udah Rupiah Murni ada PNPB dan juga pinjaman luar negeri dan SBSN.

Untuk pagu dan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022, jadi sampai pada tanggal 23 Agustus kemarin itu penyerapan sebesar 68,76%, dimana ini sedikit melampaui kurva prediksi kami yang 65,7%. Untuk pagu dan realisasi anggaran per jenis belanja itu seperti terlampir, untuk belanja pegawai untuk sebesar 80,19%, belanja barang sebesar 52,39% dan belanja modal sebesar 69,46%.

Berikutnya, itu kami tampilkan pagu dan realisasi anggaran per satuan kerja per rincian *output*. Pagu yang tertulis adalah setelah dua kali *automatic adjustment*, mungkin ini kami tidak perlu sampaikan, kami bisa lanjut ke progres ke halaman 8.

Jadi khusus untuk apa di satker Deputi SDM IPTEK telah dilakukan 8 skema yang terkait dengan mobilitas per riset yang ini masih terus dilanjutkan, termasuk didalamnya adalah *barista*. Khusus untuk *barista cut off* kami lakukan setiap minggu untuk mempercepat proses agar bisa apa tidak perlu menunggu apa *page-page* berikutnya. Di Deputi SDM IPTEK selain itu juga ada pengembangan kompetensi dari SDM IPTEK dengan target 600 orang yang sampai saat ini telah terealisasi sebanyak 800 orang.

Kemudian untuk di Deputi Infra, Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi. Jadi ini sebagian besar adalah SBSN yang bersumber dari SBSN untuk pembangunan infrastruktur yang di kawasan sains dan teknologi Cibinong, kemudian yang ada di, yang sudah selesai 100% dan sedang dalam proses untuk peralatan, kemudian yang di TTG Subang, Teknologi Tepat Guna Subang itu juga sudah selesai 100% dan yang sedang dalam proses adalah peralatan juga.

Kemudian untuk kawasan bio diversitas Indonesia, yang di Kebumen itu sudah akan selesai *inshaa* Allah 2 bulan lagi dan proses pengadaan peralatan juga sedang berjalan.

Kemudian untuk yang sedang berjalan adalah juga pembangunan yang di Bandung di situ, itu sudah akan selesai dalam beberapa bulan ini, tetapi pengadaan peralatan juga sedang masih berjalan sampai dan ini masih akan berlanjut sampai tahun depan karena ini adalah SBSN *multi-years*.

Kemudian untuk infrastruktur rumah kaca yang ada di KSP Cibinong, ini progres gedung 42,86% dan pada saat yang sama juga sedang proses pengadaan berbagai peralatan. Sedangkan untuk fasilitas stasiun bumi pengendali dan penerima data satelit yang ada di Biak, gedung telah selesai 100% dan saat ini sedang proses pengadaan peralatan, khususnya untuk antena satelit.

Kemudian, infrastruktur fasilitas laboratorium pengolahan mineral lokal yang ada di Tanjung Bintang, di Lampung, ini proses pembangunan gedung sedang berjalan bersamaan dengan pengadaan peralatan lab, demikian juga halnya dengan pembangunan fasilitas untuk penginderaan jauh, ini juga sedang berjalan pembangunan gedung dan pada saat yang sama juga sedang dilakukan pengadaan peralatan labnya, tetapi keduanya akan selesai sebelum akhir tahun ini.

Kemudian untuk di Deputi fasilitasi riset dan inovasi itu ada 9 skema, 9 skema untuk fasilitasi riset dan inovasi mulai dari pusat kolaborasi riset untuk ekspedisi dan eksplorasi, perusahaan formula berbasis riset, riset inovasi Indonesia maju dan tiga pengujian, skema pengujian produk inovasi untuk kesehatan, untuk pertanian dan juga untuk teknologi dari layar dan juga fasilitasi untuk *repository* dan juga perizinan.

Untuk Deputi pemanfaatan riset dan inovasi, itu ada 2 apa program besar yaitu, pemanfaatan riset dan inovasi, serta inovasi yang dilisensikan ke industri. Jadi pada tahun 2022 ini ada dari target sebesar 150 inovasi yang dilisensikan itu sudah tercapai 38 inovasi.

Untuk Deputi Kebijakan Riset dan Inovasi. Jadi ini telah.

F – PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):

Intrupsi, Pak.

38 inovasinya tolong di list inovasi apa aja, di mana dan dilakukan oleh siapa.

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (Dr. LAKSANA TRI HANDOKO, M.Sc.):

Baik, Bu. Mungkin nanti ya Bu ya. Baik kami catat dulu. Terima kasih, Bu Andi.

Kemudian, mana tadi, oh untuk Deputi Kebijakan Riset dan Inovasi. Jadi telah dilakukan penyusunan 14 dokumen rekomendasi kebijakan yang terkait dengan sektor riset dan inovasi, khususnya adalah terkait dengan tata kelola

perizinan dan juga regulasi turunan dari Undang-Undang 11 2019. Yang kedua adalah survei, karena Deputi kebijakan riset dan inovasi ditugaskan untuk melakukan survei yang beberapa survei tadinya dilaksanakan oleh Kementerian dan Lembaga terkait, contohnya adalah survei demografi dan kesehatan Indonesia yang sedang dilaksanakan pada tahun ini.

Kemudian untuk Deputi Kebijakan Pembangunan. Deputi Kebijakan Pembangunan ini adalah mitra dari Kementerian dan Lembaga untuk menyusun berbagai rekomendasi kebijakan yang terkait dengan sektor-sektor dari kementerian dan lembaga teknis tersebut.

Kemudian untuk Deputi Riset dan Inovasi Daerah, tahun ini Deputi Riset dan Inovasi Daerah difokuskan untuk mendorong pembentukan badan riset dan inovasi daerah di, baik di provinsi, kabupaten maupun kota di seluruh Indonesia dan saat ini provinsi sudah ada 9 provinsi dan 4 diantaranya sudah terbentuk, sedangkan untuk di kabupaten/kota itu ada 32 yang sudah sedang berproses dan 1 sudah terbentuk.

Kemudian untuk riset di organisasi, riset dan inovasi di organisasi riset, jadi yang pertama bisa kami sampaikan yaitu yang terkait dengan proses teknologi kendaraan listrik berbasis baterai yang berlisensi Indonesia, ini yang sampai akhir tahun di, ditargetkan untuk dapat menghasilkan 10 prototipe bersama dengan mitra industri yang akan kami manfaatkan untuk di lokasi-lokasi yang tertutup.

Kemudian untuk kesehatan, untuk kesehatan itu ada 2 topik besar yaitu pengembangan alat dan deteksi kesehatan sebagai upaya preventif untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan juga, oh ini sudah ada 10 target, targetnya ada 10 yang harus dicapai sebelum akhir tahun ini. Jadi mulai dari perangkat kedokteran nuklir, kemudian juga untuk alat deteksi seperti alat deteksi kanker serviks dan sebagainya.

Kemudian untuk teknologi tepat guna, itu direncanakan ada 30 target purwarupa sampai dengan akhir tahun sehingga saat ini sudah ada beberapa ya.

Kemudian untuk teknologi pengemasan pangan, jadi ini upaya kami yang diminta untuk mendukung kedaulatan pangan di tengah kondisi global saat ini. Jadi yang pertama adalah pengemasan pangan dan juga pengemasan yang khusus yang bisa dimakan *edible* apa *edible* kemasan, kemasan *edible* maksudnya dan juga berbagai benih unggul, baik melalui cara-cara konvensional maupun secara genetika.

Kemudian untuk riset material maju. Jadi telah dilakukan sintesa dan aplikasi ya perekat poli-urea ramah lingkungan untuk pengolahan limbah, sehingga bisa memiliki, sehingga bisa menjadi produk komposit yang memiliki nilai ekonomi.

Kemudian juga perkembangan teknologi energi baru terbarukan. Jadi disini kami mengembangkan desain sistem kontrol untuk *feeding* dan juga

konversi limbah plastik menjadi minyak bakar, ini setidaknya ada 2 grup yang melakukan ini, kemudian juga menghasilkan bio gas dan juga GNG dari *pome* dari limbah kelapa sawit.

Kemudian untuk penelitian dan pengembangan satelit. Jadi karena kami ditargetkan sejak awal, akan ada A-4 yang sedianya akan diluncurkan di akhir tahun ini. Jadi pengembangan satelit difokuskan untuk penyelesaian satelit A-4 ya satelit *experimental* A-4 untuk tujuan penginderaan jauh.

Kemudian untuk penelitian dan pengembangan, untuk terbaru, untuk teknologi penerbangan, jadi kami masih melanjutkan yang N-219. Jadi saat ini N-219 sudah dalam apa sudah, sudah disepakati lisensinya dengan PPD dan selanjutnya kami masuk ke pengembangan dari N-219 amfibi, khususnya terkait dengan material dan desain dari gondola untuk menggantikan roda yang menjadi bagian paling penting dari pesawat amfibi.

Kemudian untuk antariksa. Jadi sampai saat ini untuk antariksa ini kami banyak terkait dengan pemodelan dan juga khususnya untuk memanfaatkan data citra satelit, dari satelit penginderaan jauh yang sudah ada di kami.

Kemudian untuk roket, jadi saat ini kami fokus dengan Kementerian Pertahanan untuk mendukung Kementerian Pertahanan membuat, mengembangkan roket 2 tingkat yang berdiameter 40, 450 milimeter 45 centi, sehingga sekarang sedang dilakukan desain dari roket ini.

Kemudian untuk iklim dan, dan atmosfer. Jadi di sini banyak dikembangkan model-model dan simulasi untuk melihat perubahan iklim, khususnya yang terkait dengan area, terkait dengan laut, dan juga apa di atas persis, yang di atas permukaan laut dan juga mensimulasikan bagaimana pengaruh dari perubahan iklim dan juga perubahan ketinggian permukaan laut terhadap apa perubahan iklim di darat.

Kemudian untuk kebumihutan dan maritim. Jadi perlu kami laporkan bahwa kami sudah selesai dengan program *coral reef rehabilitation management program*, ini yang *Coremap*, yang tadinya ada di KKP, itu memang dijadwalkan di selesai pada bulan Juni 2022 dan di lain sisi tim kebencanaan biologi itu banyak melakukan riset yang terkait dengan apa untuk, untuk mengidentifikasi titik-titik potensi dari sumber bencana dan untuk memahami berbagai mekanisme kebencanaan yang nanti akan menjadi informasi yang sangat penting untuk pengembangan teknologi-teknologi deteksi kebencanaan lebih lanjut.

Nah, untuk teknologi kebencanaan. Jadi kami melanjutkan riset untuk sensor yang berbasis pada kabel laut, tetapi sensor ini untuk sampai saat ini kita lebih fokuskan untuk melakukan *monitoring* lingkungan di area perairan, baik itu di perairan laut, sungai, maupun di danau. Karena, kalau untuk sensor deteksi tsunami itu kami memerlukan informasi yang lebih lengkap terkait dengan titik-titik potensi dan juga sumber bencana yang mungkin bisa memicu terjadinya tsunami.

Selain itu, juga karena BRIN itu masuk di dalam dewan sumber daya air nasional jadi kami diminta dukung PUPR untuk terkait dengan manajemen sumber daya air dan danau, khususnya di 15 danau prioritas di seluruh Indonesia.

Kemudian, kami juga melakukan pengembangan purwarupa ini terkait nuklir untuk sistem pemantauan radiasi untuk keselamatan dan keamanan dan juga teknologi pembangkit listrik tenaga nuklir, khususnya untuk SSK reaktor, jadi sistem fungsi dari reaktor itu sendiri dan juga teknologi radiasi nuklir dan bekas partikel yang diaplikasikan untuk keperluan medis dan industri.

Kami juga melakukan riset terkait sosial, khususnya fokus pada tahun ini adalah terkait identitas, keragaman dan budaya. Kemudian juga terkait dengan konservasi, konservasi bio diversitas nasional itu ada pengungkapan dan pemanfaatan biodiversitas nusantara yang dilakukan melalui program ekspedisi dan eksplorasi, serta konservasi eks itu dari hasil ekspedisi dan konservasi tersebut untuk dikonservasikan di berbagai kebun raya sesuai sektor izinnya.

Demikian Bapak Pimpinan yang dapat kami laporkan pada kesempatan ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya kembalikan kepada Bapak Pimpinan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Terima kasih kepada pemaparannya dan penjelasan yang telah disampaikan kepada kami semua.

Selanjutnya, sebelumnya saya, saya dari tadi nih, kita, kita mau pendalaman ada dua agenda, jadi kita pendalaman dulu yang 2021, nanti kita pendalaman dulu, selesai itu kita pendalaman yang putaran kedua yang 2022.

Tapi sebelumnya Pak, untuk yang 2021 ini kan ada 2 WDP yang diterima oleh BRIN dan LIPI, Pak ya. Ini kita akan melaporkan ini ke Badan Anggaran, jadi kita akan menyerahkan ini. Kami butuh penjelasan sebetulnya tentang 2 WDP ini secara tidak **...(suara tidak jelas 31:16)** tapi kita harus tau ini sebetulnya permasalahannya kenapa gitu loh Pak, apa.

Memang tadi yang disampaikan oleh Kepala BRIN bahwasanya ini baru diterima tanggal 9 Agustus, tapi setidaknya kami perlu tau *headline* kira-kira detailnya apa sebetulnya yang menjadi, membuat dua lembaga ini mendapat WDP. Saya pikir sebelum, sebelum pendalaman kita tanyakan itu dulu ya boleh ya. Nah itu, jadi kita harus jelas dulu yang 2 poin tadi WDP karena apa, baru nanti kita pendalaman, setuju ya saya pikir ya. Boleh Pak ya, iya terima kasih.

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (Dr. LAKSANA TRI HANDOKO, M.Sc.):

Baik. Mohon izin Bapak Pimpinan untuk merespon.

Jadi kalau untuk WDP yang BA-080 yang Kemristek BRIN itu terjadi karena ada 2 masalah, yang pertama itu adalah terkait dengan catatan persediaan, itu ada di 2, 2 satker, yaitu di satker Puspitek, jadi bukan di kawasan Pak ya satkernya Puspitek dan yang kedua itu ada di Eijkman, yang waktu itu ada di bawah Deputi Risbang, satker Deputi Risbang. Jadi ada persediaan yang intinya tidak tercatat itu, dan jumlahnya itu kalau standar persediaan itu cukup besar meskipun sebenarnya totalnya sekitar beberapa ratus juta nilainya.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Ratus juta, Pak?

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (Dr. LAKSANA TRI HANDOKO, M.Sc.):

Iya.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Ga sampai m ya.

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (Dr. LAKSANA TRI HANDOKO, M.Sc.):

Tidak, tapi kalau persediaan itu kan standarnya tidak sampai 200 juta Pak ya, jadi kurang lebih itu kalau untuk yang di Kemristek BRIN, yang 080.

Kalau yang di LIPI yang BA-079 itu masalahnya adalah ada PNBPN yang terkait dengan uji virus sebesar 4,2 miliar yang langsung dibelanjakan. Jadi tidak masuk di PNBPN. Jadi sebenarnya itu dilakukan sejak awal pandemi 2020, karena kami memang diminta untuk cepat, sedangkan pada saat itu kami tidak memiliki anggaran untuk mendukung Kemkes untuk melakukan uji, uji virus secara masif, ini yang ada di Cibinong. Nah itu yang baru 2021 kami terlupa untuk, karena sudah dianggap biasa begitu, jadi itu terlewat tidak dimasukkan PNBPN dulu gitu.

F – PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, MSc):

Apa dasar hukumnya Pak bisa langsung membelanjakan penerimaan negara bukan pajak, itu kan harus masuk dulu. Kalau nanti semua modusnya seperti ini bisa bahaya ini di dalam sistem laporan keuangan.

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (Dr. LAKSANA TRI HANDOKO, M.Sc.):

Ya, betul Ibu, ya, ya betul.

Jadi sebenarnya, jadi dicatatnya belakangan Bu, jadi itu yang memang itu menjadi koreksi kami bahwa, tapi itu memang teman-teman terlupa karena di 2020 memang seperti diberikan diskresi untuk melakukan itu agar bisa cepet aja gitu, tapi 2021 itu ternyata masih berlanjut dan kita terlupa ya.

F – P. NASDEM (RICO SIA):

Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Ya, silahkan.

F – P. NASDEM (RICO SIA):

Masih terkait dengan, saya Rico, Rico Sia A-408. Izin, tadi terkait dengan penjelasan yang disampaikan oleh Bapak, saya mengingatkan bahwa bangunan yang waktu itu, yang sementara sudah mau selesai kan waktu itu kan masih masalah karena belum ada di dalam laporan. Maksud saya mengingatkan saja persiapkan memang alasannya, supaya jangan nanti dapat WDP lagi karena itu bagian dari salah satu yang salah, jadi hanya sekedar mengingatkan saja bahwa bangunan itu kemarin kan masih masalah ya.

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (Dr. LAKSANA TRI HANDOKO, M.Sc.):

Yang di Rumpin ya, Pak?

F – P. NASDEM (RICO SIA):

Iya, yang waktu kemarin belum dimasukkan nggak ada anggaran tapi udah dilaksanakan. Nah, mungkin itu yang dimaksudkan oleh tadi rekan kami Ibu Andi bahwa, jangan sampai orang menganggap ini barang biasanya ya udah bikin dulu nanti baru terakhir baru dimasukkan. Nah itu jangan sampai terjadi lagi nanti yang udah biasa WTP jadi WDP gara-gara begitu.

Terima kasih, Pimpinan.

F – PKS (Dr. H. MULYANTO, M.Eng.):

Izin, Pimpinan.

**KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI
PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Ya, silahkan Pak.

F – PKS (Dr. H. MULYANTO, M.Eng.):

Ya masih lanjut soal WTP ini.

Ini kan pengalaman saya ya menjaga WTP agar tetap konsisten ya ini kan tidak mudah ini. Saya kok jadi melihat cukup aneh yang terkait dengan dana persediaan ... **(suara tidak jelas 36.04)** 200 juta ya kan, kurang dihabiskan masuk lagi 200 juta kan, ini mungkin dugaannya lebih kan dari 200 juta, pada saat temuan dibuka kas lebih ini dari 200 juta, harusnya ga WDP karena itu, harusnya kan bisa disampaikan hal-hal, ya penjelasan lah. Karena sebelum, sebelum ini diperiksa kan kita ga *hearing* biasanya dengan pihak BPK kan, apakah menerima temuan ini dan sebagainya, dan sebagainya.

Kalau hanya itu, seharusnya ini ga WDP ini, tetep WTP, itu yang pertama. Makanya saya cukup menyesalkan juga ini koq turun jadi WDP kalau hanya temuannya seperti itu.

Yang kedua terkait LIPI. Nah, kalau terkait LIPI memang cukup material saya lihat 4,2 m ya kan, lalu penggunaannya ini nggak punya dasar. Untuk bukan *fraud* itu, tapi hanya keteledoran di,, apa tadi itu ya yang sebelumnya dapat diizinkan ya.

**KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (Dr. LAKSANA TRI
HANDOKO, M.Sc.):**

Tidak, tidak dimasukkan ke PNPB dulu.

F – PKS (Dr. H. MULYANTO, M.Eng.):

Iya.

**KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (Dr. LAKSANA TRI
HANDOKO, M.Sc.):**

Kalau pengadaannya tidak ada masalah.

F – PKS (Dr. H. MULYANTO, M.Eng.):

Untung ini bukan, bukan apa ada unsur *fraud*-nya, tapi administratif sebetulnya, ya Pak ya. Administratif, cuma cukup material 4,2 m, jadi turun memang.

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (Dr. LAKSANA TRI HANDOKO, M.Sc.):

Di atas 2 m soalnya, Pak.

F – PKS (Dr. H. MULYANTO, M.Eng.):

Iya, cukup material 4,2 m. Namun yang awal cuman nambah sedikit tapi WDP, wah itu sangat disayangkan.

Karenanya apa, untuk 2022 ini jangan sampai berulang hal ini Pak, mudah-mudahan bisa WTP kembali gitu, karena ini kan kesalahan kecil seharusnya, bisa dikembalikan lagi menjadi WTP begitu.

Demikian, Pak.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya, terima kasih Pak.

Oke, tadi udah ada penjelasan mungkin sudah diterima oleh rekan-rekan semua untuk yang WDP tadi, memang dua poin itu tadi adalah kelalaian ya Pak ya, Pak Kepala ya, nah ini jangan sampai terulang. Kita gimana, kita lihat nih 2022 tadi Pak Rico juga sudah mengingatkan, jangan sampai yang ini kejadiannya lagi gitu loh.

Ya boleh, kita mulai pendalaman ya dengan rekan-rekan semua. Kita pendalaman untuk yang mengenai pembahasan laporan keuangan pemerintah pusat APBN 2021.

Oh, ini belum paparan ya BIG dan BAPETEN ya? Kita mau lanjut aja ya, paparan dulu ya biar nanti sekaligus aja ya nanti jawabnya ya, lanjut aja ya ini, oke silakan BAPETEN dulu, silakan.

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (SUGENG SUMBARJO) :

Terima kasih, Pimpinan.

Yang mulia anggota Komisi VII,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Kami akan menyampaikan laporan keuangan badan pengawas tenaga nuklir pada tahun 2021. Tahun, tampilannya belum, layarnya. Oke terima kasih.

Untuk tahun 2021 kami menerima opini dari BPK WTP, ini WTP yang keempat bagi BAPETEN. Kemudian, laporan keuangan kami tahun 2021 audit, ini telah diperiksa oleh BPK yang berkaitan dengan semua hal yang bersifat material, yang mencakup posisi keuangan, laporan realisasi anggaran,

laporan operasional, serta perubahan ekuitas sampai dengan tanggal 21 Desember 2021.

Secara umum, laporan keuangan kami mengalami penurunan sekitar 6%, ini karena aset, aset total, karena aset itu ada aset lancar dan juga aset tetap yang memang setiap tahun bisa menurun atau menaik, tetapi dari sisi akuntabilitas ini tidak dianggap wajar saja.

Untuk laporan realisasi anggaran tahun 2021, kami mencapai 98,68%. Kalau dibandingkan dengan 2020, kami hanya 85,25% sehingga capaian ini cukup bagus kami bisa menghabiskan anggaran sampai dengan 98%.

Kemudian untuk laporan keuangan, laporan keuangan secara keseluruhan untuk kegiatan operasional, kegiatan non-operasional maupun *cost* untuk luar biasa, mungkin secara total, secara defisit Rp101 miliar. Ini jika dibandingkan dengan tahun 2020.

Kemudian untuk laporan perubahan ekuitas kami juga mengalami penurunan dari 201 miliar menjadi 181 miliar, kemudian juga ekuitas akhir menjadi Rp170 miliar.

Bapak/Ibu sekalian,

Untuk tindaklanjut atau temuan-temuan dari BPK tahun 2021 kami ada 3 temuan dengan 5 rekomendasi, dimana 4 rekomendasi sudah kami laksanakan, sudah kami sampaikan ke BPK, masih 1 rekomendasi yaitu terkait dengan pengelolaan aplikasi, aplikasi pengolahan BMN yang kami akan selesaikan pada 1 November batasnya. Kami juga sama menerima tanggal 19 Agustus tahun 2022 kemarin baru menerima hasil audit BPK kepada kami.

Kemudian untuk LKPP-nya kami lanjutkan untuk res, resasi atau evaluasi anggaran tahun 2021, 2022 mohon maaf 2022. Realisasi anggaran kami sampai dengan bulan Agustus, tanggal 19 Agustus tahun 2022 adalah sebesar 62,43%. Ini dengan program dukungan manajemen sebesar 65% dan dukungan riset dan IPTEK sebesar 51,31%.

Kegiatan atau *output* strategis tahun 2022, yaitu yang pertama adalah masalah perizinan. Untuk perizinan bidang industri, kesehatan, dan penelitian, juga untuk perizinan instalasi bahan nuklir, sertifikasi personil, sertifikasi keandalan peralatan, sertifikasi dan verifikasi bungkus, bungkus itu adalah *packaging* untuk mengangkut bahan-bahan nuklir, evaluasi verifikasi dokumen untuk instalasi non-reaktor dan juga reaktor non daya menunjukkan lab uji layak lembaga kenukliran pengembangan teknologi informasi, kemudian elektronik dan sebagainya, dari target 4.750 katun kami sudah menerima permohonan atau menerbitkan 5.057 katun dengan realisasi anggaran sekitar 2,63 m dari 6,9 m sekitar 40%.

Kemudian untuk pelaksanaan inspeksi, inspeksi untuk keselamatan, keamanan, untuk asas kesehatan, industri dan penelitian juga ada inspeksi untuk instalasi nuklir, *safe guard* dan protokol tambahan. Inspeksi keselamatan

lingkungan pengawasan dosis pekerjaan imigrasi lingkungan di ...(suara tidak jelas 44.33).

Dari alokasi anggaran 4,14 m kami sudah realisasikan sebesar 2,14 m dan laporan hasil inspeksi dari target dari 611, sudah kami laksanakan 366 juta, 60% dari rencana.

Kemudian, kami juga melengkapi infrastruktur pengawasan kami. BAPETEN mengembangkan sistem informasi pengawasan basis ...(suara tidak jelas 45.06). Ini adalah sistem laporan dari seluruh instalasi nuklir yang ada, yaitu baik di Serpong, di Jogja maupun di Bandung, itu secara rutin kepada BAPETEN, sehingga pada pengawasan partifipatif ini, pengawasannya tidak hanya melulu dari BAPETEN, tetapi juga sudah ada *self asessment* dari pihak fasilitas. Untuk saat ini untuk instalasi nuklir adalah BATAN. Jadi kami sudah membuat standar, membuat sistem juga untuk hal-hal secara, secara *online*.

Untuk bidang kesehatan dan industri kami mengembangkan basis yang sudah terkoneksi dengan sistem OSS-nya Kementerian Investasi maupun atau BKPM. Dalam pelaksanaan ini kami juga menekankan adanya partisipasi aktif dari para pengguna.

Target, saat ini realisasinya masih rendah sekitar 0,8 m dari 1,94 m, karena ada beberapa pekerjaan yang belum selesai, sehingga kami belum melakukan pembayaran. Tapi kami targetkan di akhir bulan November itu semua sudah bisa dapat direalisasikan dengan baik.

Kemudian untuk pengembangan infrastruktur, peningkatan sistem keamanan dalam instalasi nuklir, kami juga mengembangkan infrastruktur nuklir nasional dengan operasional ADMS. Tadi kalau di BRIN disampaikan sedang mengembangkan untuk peralatan proteksi, untuk pemantauan dan keamanan maupun keselamatan dan juga untuk lingkungan sedang dikembangkan.

Nah, kami yang sudah memiliki izin operasional ADMS ini, serta tadi kami masih mengadakan langsung jadi impor, dan sudah ada dua *prototype* yang dibuat oleh BRIN atau BATAN waktu itu menjadikan uji coba. Jika nanti hasil dari riset pengembangan alat pemantauan lingkungan ini maupun untuk keamanan untuk lingkungan ini bisa di, diselesaikan dengan baik, maka secara bertahap kami akan membangun atau memasang menggunakan produksi dalam negeri, yaitu target, targetnya. Kemudian untuk beberapa kegiatan, instalisasi kegiatan-kegiatan kesekjenan, juga acara-acara internasional kami juga di, dilibatkan.

Dari anggaran 5,15 m sudah terealisasi sekitar 2,87 m atau sekitar 65%. Kemudian untuk pengembangan sistem pengawasan PLTN kami saat ini masih mempersiapkan, kami mempersiapkan seluruh infrastrukturnya untuk ada *joint* *review* jejaring kerja evaluator perizinan IBM, dan juga penyusunan *keseragaman* untuk sistem perizinan, karena yang untuk perizinan IBM saat ini yang dikombinasi oleh banyak penggunanya adalah BRIN, kami belum melakukan secara *online* masih secara manual, sehingga kami pada tahun ini

akan menargetkan untuk menyusun, sehingga teman-teman dari BRIN bisa mengajukan permohonan, dan kami melakukan evaluasi secara *online*.

Karena banyaknya dokumen yang di evaluasi, sehingga harus mendistribusikannya kepada para evaluator. Nah, itu per bab, ada yang per buku, per bab, per sub bab dan sebagainya itu. Ini lebih ke manajemen pengelolaan file yang diajukan dan juga membuat laporan hasil evaluasinya.

Kemudian, kami juga sudah melaksanakan *executive meeting* agar antar K/L untuk menyusun *roadmap* pengawasan tingkat pertama di desa dan juga menyiapkan TSO, *technical spot organization*, lembaga ineksi teknis di desa, ini melibatkan pemerintah daerah juga perguruan tinggi. Dari alokasi 0 koma dari 4 sekitar 400 juta kami sudah merealisasi sekitar 270 juta atau 70%.

Berikutnya adalah kegiatan penyusunan peraturan dan kebijakan atau pembinaan, kami melanjutkan, tetap melanjutkan penyusunan peraturan Undang-Undang Ketenaganukliran dan BAPETEN juga terlibat dari sisi pemerintah untuk me, kemarin menanggapi juga memberikan masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Energi Baru Dan Energi Terbarukan.

Kemarin juga penyusunan perancangan peraturan pemerintah untuk mendukung kegiatan kesehatan, industri, juga untuk kegiatan yang pemanfaatan bahan nuklir. Penyusunan peraturan badan juga kami lakukan untuk seluruh aspek pengawasan **ketenaganukliran**. Dari 40, dari 4,45 m kami sudah gunakan sekitar 1,94 m, sekitar 40%. Demikian, Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Oke, terima kasih Bapak dari BAPETEN, Bapak Kepala BAPETEN.

Dilanjutkan dari Kepala BIG, silakan Pak.

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (MUH ARIS MARFAI):

Terima kasih, Bapak Pimpinan Komisi VII.

Yang kami hormati Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi VII,

Mohon izin dari BIG untuk melaporkan alokasi dan realisasi anggaran di tahun 2021. Distribusi realisasi anggaran sebesar 84%, dimana program dukungan manajemen 90% dan penyelenggaraan informasi geospasial 80%.

Untuk secara lebih rinci, pembangunan stasiun dan jaring kontrol daya berat, stasiun Cors target 86 unit, realisasi 86 unit, jaring kontrol geodesi, jaring kontrol gaya berat target 20 unit realisasi 20 unit, dan stasiun pasang surut target 40 unit realisasi 40 unit.

Kemudian, untuk perawatan stasiun, stasiun Cors target 278 unit dan realisasi 278 unit, jaring kontrol daya berat target 9 unit realisasi 12 unit, stasiun pasang surut target 170 unit, realisasi 170 unit dan titik pantau **...(suara tidak jelas 52.17)** target 55 unit realisasi 55 unit.

Untuk kesepakatan batas negara di tahun 2021 target 8 kesepakatan realisasi 8 kesepakatan untuk batas laut antara lain dengan Malaysia, dengan Filipina, dengan Vietnam dan dengan Paloh. Untuk kesepakatan batas darat 4 target dan realisasi 4 kesepakatan antara lain dengan Malaysia 2 dan dengan Timor Leste 2.

Untuk pilar batas negara dengan Malaysia target 10 unit realisasi 10 unit, dengan Timor Leste target 70 unit realisasi 70 unit, dengan PNG target 50 unit realisasi 50 unit dan untuk titik dasar dan referensi target 10 unit dan realisasi 10 unit.

Untuk kesepakatan teknis batas desa atau kelurahan di tahun 2021 target 4.334 desa dan kelurahan realisasi 4.339 desa dan kelurahan. Untuk batas negara target output 410.000 kilometer persegi dan realisasi *output* 414, 414.448.000 kilometer persegi, termasuk pemetaan landas kontinen.

Bapak/Ibu sekalian,

Untuk kegiatan pemetaan rupa bumi 1:5.000 target 13.205 kilometer persegi realisasi 13.207 kilomter persegi. Kemudian untuk dokumen Kesatuan Republik Indonesia target 1.500 unit dan 1.782 unit dan kemudian untuk asistensi dan supervisi peta rencana tata ruang alokasi target 20 rekomendasi dan realisasi 20 rekomendasi. Kemudian untuk pembangunan data *centre* geospasial target 1 layanan dan realisasi 1 layanan.

Kemudian untuk LKPP APBN tahun 2021 perlu kami sampaikan opini BPK terhadap laporan keuangan BIG 5 tahun berturut-turut WTP sejak tahun 2017 sampai dengan 2021 dan kami sampaikan banyak terima kasih atas kerjasama, termasuk juga dengan Komisi VII dalam hal ini.

Laporan keuangan BIG untuk 2021 auditif telah yang dipublikasikan di harian nasional Kompas tanggal 23 Agustus 2022. Kemudian untuk neraca laporan keuangan, baik untuk aset lancar, aset tetap maupun piutang jangka panjang ini total kewajiban dan ekuitas sebesar 1,2 Triliun.

Kemudian untuk laporan realisasi anggaran total jumlah belanja realisasinya adalah 404 miliar atau 84%, sedangkan untuk laporan operasional dari pendapatan negara bukan pajak sebesar 2,8 m dan beban operasional sebesar 599 m sehingga defisit sekitar 596 m. Sedangkan untuk laporan perubahan ekuitas, baik dari koreksi nilai persediaan atas reklasifikasi, revaluasi aset maupun non revaluasi ini sebesar 1,2 m.

Bapak/Ibu sekalian,

Kami di BIG juga sudah melakukan tindak lanjut dan LHP BPK, dimana dari tahun 2006 sampai dengan 2021 ini sudah bisa kita reduksi, yang belum sesuai hanya tinggal 2 dari LHP BPK dari jumlah temuannya rekomendasi dari BPK 22. Kemudian, dari 8 temuan dari 22 rekomendasi hasil pemeriksaan BPK di 2021 terdapat 2 rekomendasi yang sedang dalam proses penyelesaian.

BIG mendapatkan WTP 5 kali berturut-turut, dan berdasarkan LHP 2022 terdapat 8 temuan dan 17 rekomendasi yang sifatnya administrasi dan sedang dalam proses BIG.

Demikian atas laporan keuangan BIG 2021 sudah diterima tanggal 9 Agustus dan tindak lanjut rekomendasi disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya nanti di November 2022.

Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi,

Demikian untuk laporan 2021, dan mohon izin kami akan menyampaikan untuk progres kinerja anggaran 2022.

Distribusi realisasi anggaran sampai dengan saat ini sebesar 51%, dimana dukungan manajemen 68% dan penyelenggaraan informasi geospasial di setiap kedeputusan dengan total 40%.

Untuk *output* strategis yang dibebankan atau yang diamanahkan kepada BIG yaitu prioritas nasional 01, prioritas nasional 02, prioritas nasional 06, dan prioritas nasional 07 dengan rincian sebagai berikut:

Untuk prioritas nasional 01, garis pantai prioritas yang termutakhir target kita 6.000 kilometer dengan alokasi pembiayaan 10 M yang saat ini sudah dilakukan survey di Karimun Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara, ini dalam proses lelang.

Kemudian, untuk prioritas nasional yang kedua yaitu unsur upah bumi skala besar, ini target 584.000 kilometer persegi, telah dilaksanakan pendampingan dan evaluasi dokumen penanganan dengan skema KPBUMS sebagai amanah Kepres 11 2021.

Kemudian untuk PN2 data geospasial dasar, ini telah dilakukan juga sinergi atau *inline* sejalan dengan program KPBUMN di 20 provinsi yang kita kerjakan.

Kemudian untuk layanan data *centre* pada saat ini sudah tahap pada pemangan *power supply* dan *renewal* asensi 77 M. Kemudian untuk kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa dan kelurahan kita targetkan 4.000 desa dengan alokasi 9 m yang saat ini sudah secara indikatif berproses penegasan batas desanya di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, dan saat ini masih proses lelang untuk Sumatera Selatan dan Lampung.

Kemudian untuk titik pantau geo dinamika yang dikelola, ini merupakan prioritas nasional 06 dengan alokasi 1,1 m dengan 90 target, sudah kita laksanakan titik pantau di lokasi titik 0 IKN, kemudian juga di 70 titik *geodinamic*, yaitu di sesar kendil, sesar peripis dan sesar semangkok.

Kemudian untuk stasiun Indonesia **Cors** dalam mendukung **(suara tidak jelas ... 59.20)** *early warning system* untuk **kebencanaan**, sudah dialokasikan 45 stasiun yang saat ini dalam proses pelaksanaan kegiatan pembangunan, diperkirakan selesai akhir tahun. Kemudian untuk stasiun pasang surut dalam rangka mendukung *early warning system* terhadap tsunami, ini kita akan membangun 40 stasiun dengan alokasi 28 M yang saat ini sedang berlangsung di Sumatera Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalteng, Sulteng, Sulut, Sulawesi Selatan, Sutra, NTT, Maluku, Maluku, Papua Barat dan Papua.

Kemudian untuk prioritas nasional 07, kesepakatan teknis perundingan batas darat dan lain telah terealisasi sebanyak 4 kesepakatan yaitu dengan Timor Leste, Filipina, Vietnam dan Malaysia dari 11 kesepakatan yang kita targetkan.

Kemudian untuk pilar batas negara, ini sudah dilaksanakan survey pelaksanaan pembangunan titik dasar yang terverifikasi di Papua Barat dan survey pendahuluan di Kalimantan Utara, **...(suara tidak jelas 1.00.20)** akan selesai di tahun ini. Kemudian untuk batas negara, telah dilakukan pemetaan batas negara antara Indonesia dengan Papua Nugini di Provinsi Papua seluas 760 kilometer persegi.

Bapak/Ibu, mohon izin untuk menyampaikan informasi. Saat ini landas kontinen Indonesia kita mempunyai perluasan landas kontinen 200 mil laut yang total area yang di klaim oleh Indonesia secara resmi di 3 potensi lokasi sebesar 657.000 kilometer persegi, ini akan setara dengan 1,5 kali luas pulau Sumatera dan ini satu misi yang kita laksanakan di tahun ini.

Yang terakhir, Bapak/Ibu sekalian, melaporkan pelaksanaan **parti** inovasi di BIG untuk tahun 2022 sudah terlaksana 6 kegiatan, yaitu di Belitung, Sidoarjo, Lamongan, Tuban, Malang dan Bogor, dan sekarang sedang menyusul untuk Pelabuhan Ratu, Gunung Kidul dan juga Raja Ampat, serta Indramayu.

Demikian Bapak Pimpinan Komisi VII, waktu kami kembalikan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI
PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,

Terima kasih, Pak Kepala BIG.

Kita lanjutkan pedalaman sekarang, saya bikin 2 putaran, putaran pertama kita membahas yang 2021, nanti kalau udah satu putaran selesai, mudah-mudahan hanya satu putaran untuk 2021 karena tidak terlalu banyak isu mungkin tapi langsung ke 2022. Biar ga bingung nanti bikin kesimpulannya.

Ya kita, kita bikin putaran untuk anggaran 2021 lagi tadi, silahkan dari Fraksi PDI Perjuangan siapa. Pak Bambang DH, silahkan Pak.

F – PDI PERJUANGAN (BAMBANG DH):

Baik.

Yang saya hormati Ketua dan rekan-rekan Komisi VII,
Kepala BRIN, BIG, Kepala BAPETEN dan seluruh jajaran,

Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yang pertama untuk BRIN. Memang di laporan ini tidak detail sampe program ya, tapi saya ingin menyampaikan berapa persen sih alokasi anggaran untuk apa energi tepat guna. Mengapa, karena dalam presentase anggaran ini ada nomenklaturnya, kita bisa melihat keberpihakan kita pada pelaku usaha kecil dan menengah.

Karena di daerah, warga yang termarjinalkan ini kan tidak bisa melakukan riset dengan kualifikasi yang baik, karena *expert*-nya ada di pusat, bahkan saya pernah kritik ketika di daerah kemudian ada struktur balitbang, karena praktiknya yang **dijaitkan** ke perguruan tinggi, daripada gitu struktur dihilangkan sudah, biar riset-riset itu dilakukan oleh pusat kemudian daerah menerima, sebagai *user* lah.

Utamanya misalnya terkait dengan usaha kecil menengah. Apa ada riset ya terkait energi tepat guna yang membantu peningkatan apa UMKM. Kemudian terkait dengan lingkungan misalnya, bagaimana persoalan sampah, bagaimana yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Jadi yang saya tanyakan dari sisi anggarannya, apa ada nomenklaturnya dan berapa persen kira-kira diarahkan ke sana.

Yang kedua, ini terkait dengan, Kepala BAPETEN maaf **masanturium** Pak. Kita ini penghasil timah terbesar kedua setelah Cina. Cina timahnya tidak di ekspor, tapi kita ekspor, sementara salah satu cadangannya autorium. Pertanyaannya, berapa sih cadangan autorium. Sekarang cuma segini porsinya, konon katanya 5 kali uranium, 3 kali uranium, terus pemanfaatannya apa, jangan-jangan kita olah timah ya terbuang aja ini autoriumnya, padahal di beberapa negara dia termasuk tetangga kita yang tidak punya timah, nah itu pemanfaatan autorium sudah lebih maju dia dari kita.

Mohon penjelasan singkat, karena saya ingin fokus anggarannya dari ini, tapi paling tidak untuk bahan ketika kita RDP melaksanakan fungsi pengawasan nanti paling tidak ya. Mungkin ini aja, Ketua.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/
WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Terima kasih, Pak Bambang DH.

Selanjutnya dari Fraksi Golkar, nggak ada ya, oh ada, silahkan Pak.

F – P. GOLKAR (BAMBANG HERMANTO, S.E.):

Baik. Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pimpinan dan anggota Komisi VII yang saya hormati,
Kepala BRIN, Kepala BIG, dan Kepala BAPETEN dan seluruh jajaran yang
saya hormati,

Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yang pertama ini terkait
dengan BRIN. Pada Juni 2022, realisasi pagu anggaran di TA tahun anggaran
2022 menyentuh angka 31,2% Pak, dari rencana 56,4%. Terkait hal ini, mohon
digambarkan kendala apa yang dialami, Pak.

Kemudian, kiranya dalam bulan September hingga Desember kiranya
bagaimana strategi BRIN dalam merealisasikan anggaran 2022 agar dapat
berjalan secara optimal.

Kemudian terkait dengan program dan kegiatan BRIN di tahun anggaran
2022, mohon juga agar diberikan penjelasan program dan kegiatan apa saja
yang dapat kami ajukan sebagai program aspirasi untuk pengembangan di
daerah pemilihan kami.

Selanjutnya, BRIN sebagai lembaga riset nasional memiliki pemetaan
terhadap potensi sosial ekonomi budaya dari setiap daerah. Terkait daerah
pemilihan saya di Indramayu dan Cirebon, kiranya potensi apa saja Pak yang
bisa dikembangkan dan menjadi fokus untuk penguatan riset dan
pengembangan di 2023 dari perspektif riset.

Selanjutnya, apakah ada wadah atau festival riset atau inovasi yang
dibuat oleh BRIN guna mengakomodir atau mengapresiasi para periset dan
pencipta inovasi bagi masyarakat di luar lingkungan kampus. Karena selama
ini kita hanya melihat inovasi dan riset hanya dari perspektif lingkungan kampus
saja, padahal banyak sekali talenta inovasi di luar kampus yang tidak terjamah
atau tidak **terlembaga**.

Kemudian terkait BAPETEN, terkait dengan rencana desiminasi
pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir, apakah bisa dilaksanakan di Dapil
kami, Pak BAPETEN ya.

Kemudian terkait dengan BIG, pada kesepakatan batas negara halaman 6, terdapat 12 kesepakatan yang tadi Bapak jelaskan tadi Pak, mohon diinformasikan apa saja isi kesepakatannya.

Kemudian, dalam pemetaan desa Gowa Lorong, Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten **...(suara tidak jelas 01.08.32)** terdapat spot yang berbeda, yang menyebabkan persepsi berbeda antara penetapan Kemendagri dengan hasil penetapan BIG, bagaimana tanggapan BIG terhadap persoalan ini.

Kemudian yang tadi sudah Bapak jelaskan juga, terkait dengan batas teritorial yang belum disepakati di beberapa tapal batas negara tetangga mengakibatkan terjadinya persoalan wilayah perbatasan, seperti sengketa tanah tapal batas, amanah internasional, dan lain sebagainya. Ini bagaimana cara mengantisipasinya, Pak.

Kemudian, apakah ada aplikasi yang dapat **(suara tidak jelas ... 01.09.18)** mendapatkan informasi geospasial. Demikian, Pimpinan.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Walaikumsalam warahmatullah,

Terima kasih.

Ini kalau saya lihat tadi pertanyaan udah mengarah ke 2022 juga nih, 21-22, tapi mungkin saya pikir 21 tidak banyak bertanya, kita satuin aja deh 21 sama 22 biar satu putaran biar ga banyak **(suara tidak jelas ... 01.09.44)**. Ya, jadi sekarang pertanyaan kita gabung aja ya Pak ya. Silahkan dari Fraksi Gerindra. Ga ada? Kita lanjut dari Fraksi Nasdem, silahkan.

F – P. NASDEM (ARKANATA AKRAM, S.T., B.E. (Hons) M.Eng.Sc.):

Ya. Terima kasih, Pimpinan.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang, dan
Salam sejahtera untuk kita semua,*

Mungkin saya langsung *to the point* saja, dalam hal ini saya ada dua hal yang ingin saya pertanyakan dan saya bahas. Yang pertama, yang saya dahulukan adalah terkait peran BRIN sebagai badan badan inovasi nasional dan inovasi ini bahasanya adalah inovasi yang digunakan untuk masyarakat dan yang kedua adalah untuk mengenai beberapa hal yang terkait dengan lembaga penelitian, sebagai lembaga penelitian.

Pertama-tama saya ingin mengucapkan dulu apresiasi yang setinggi-tingginya kepada BATAN, BPPT, LAPAN, BAPETEN, beserta BIG, karena telah berhasil WTP sampai hari ini, sampai tahun 2021.

Untuk pertanyaan saya yang terkait dengan masyarakat, karena ini adalah peran BRIN yang paling utama adalah untuk memberikan inovasi yang bermanfaat kepada masyarakat. Saya ingin mengingatkan kembali hasil keputusan rapat BRIN bersama DPR RI dari Komisi VII, yaitu tentang bantuan optimalisasi berdasarkan hasil evaluasi anggaran tahun 2022, yaitu pada kesepakatan bersama yang sudah kita sepahami untuk kegiatan masyarakat sebesar 1,6 triliun.

Ya memang kegiatan ini untuk masyarakat secara langsung di seluruh Indonesia, akan tetapi sampai hari ini anggaran yang baru dikeluarkan oleh BRIN itu hanya sekitar 306 Miliar, ini berdasarkan hitungan fakta dan ada bantuan yang menurut saya sangat krusial sekali untuk Dapil 3T seperti saya dari Kalimantan Utara dan juga mungkin dari Papua, Papua Barat ataupun dari, ataupun dari Maluku dan daerah 3T lainnya, yaitu bantuan arsinum, air siap minum, ini kan bantuan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di daerah 3T.

Saya menyampaikan Bapak Kepala BRIN, bahwa di Kalimantan Utara itu di dapil saya, ada banyak sekali masyarakat transmigran bekas jaman orde baru. Akan tetapi, daerah-daerah tersebut karena kekurangan anggaran, karena akses yang sulit untuk dicapai, sehingga infrastruktur itu sangat sulit sekali untuk air minum. Sampai hari ini mereka kesulitan untuk mendapatkan air minum. Kalau bukan melalui BRIN sebagai sebuah lembaga inovasi nasional, lewat mana lagi mereka bisa berharap. Karena saya kira fungsi inovasi itulah yang harus bekerja, terutama untuk arsinum ini tadi.

Dan saya ulangi lagi untuk mengingat, bahwa kesepakatan kita bersama, lebih tepatnya kesimpulan rapat nomor 4 antara BRIN dengan Komisi VII yaitu untuk menggunakan dana anggaran optimalisasi tahun anggaran 2022 sebesar 1,6 Triliun. Saya harap ini bisa terserap dengan cepat sebelum akhir tahun dan saya sangat mengharapkan sekali bahwa aspirasi ada di daerah ini, terutama untuk arsinum ini bisa tersampaikan untuk seluruh masyarakat di Indonesia, itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, mungkin saya ingin, yang kedua ini saya ingin menyampaikannya sebagai sama peneliti lah. Dari awal saya melihat BRIN ataupun masih belum berbentuk BRIN, masih bentuk LPNK, masih LPNK, yang saya lihat adalah bapak-bapak, dan ibu-ibu yang luar biasa, peneliti-peneliti Indonesia yang luar biasa yang memiliki kapasitas individual yang luar biasa. Saya sebagai peneliti ya saya mencari tau sebenarnya kapasitas bapak-bapak ibu-ibu ini bagaimana, ada yang lulusannya sampai dari luar negeri, sampai Jerman, ada yang dari Australia bersama-sama saya, ada juga yang dari Jepang seperti Bapak Kepala BRIN, akan tetapi apakah kapasitas individual ini mencerminkan kapasitas BRIN beserta jajarannya untuk bisa bergerak sebagai sebuah organisasi.

Saya kira ini secara anggaran dilihat dari hasil WDP itu tadi. Pada tahun 2021 BRIN dan LIPI itu belum WTP malah mengalami penurunan, artinya dari semenjak Kemendikti dulu. Ini ada apa di sini, dan saya coba mengaitkan dan mengingat kurang lebih ada dua minggu lalu, ada berita bahwa BRIN mampu memotong anggaran untuk penelitian yang awalnya biasa tradisi adalah 31,26 triliun, BRIN mampu memotong dari 19 triliun menjadi 7 triliun, dari 7 triliun itu 1 triliun hanya digunakan untuk belanja pegawai. Menurut saya, yang dibutuhkan oleh dunia penelitian itu bukan masalah uang yang lebih sedikit, tetapi efisiensi keuangan, karena Indonesia itu bukan kekurangan peneliti, bukan kekurangan kualitas peneliti, bukan masalah SDM di Indonesia itu kalau membahas penelitian, tetapi masalah anggaran.

Bapak/Bapak, Ibu/Ibu di sini bagaimana cara memanfaatkan anggaran itu dengan benar. Coba kita rekam ulang dari kesuksesan-kesuksesan negara lain yang kalau misalnya kita ingin mengarah ke negara maju dengan penelitian yang maju, maka kita contoh beberapa negara yang ketahui.

Thomas Alfa Edison itu ruang penelitiannya itu hanya modifikasi dari ruang keluarganya saja, di rumahnya sendiri, dan dia berhasil menghasilkan bahkan ribuan.

Issac Newton, itu ruang studi rumahnya sendiri dipakai untuk menghasilkan teori yang sampai hari ini ya Bapak/Bapak juga gunakan, **(suara tidak jelas ... 01.16.23)** dan pengalaman saya sendiri walaupun memang sebenarnya ini lab kering, tetapi di ruangan 6 kali 6 saja dengan 5 peneliti muat didalamnya dalam satu tahun itu bisa sampai 4 sampai 10 jurnal Q1 yang bisa diproduksi. Kemudian dari BRIN bagaimana ini dan lembaga-lembaga penelitian Indonesia bagaimana, apa yang dihasilkan sebenarnya.

Saya mau meminta penjelasan juga dalam hal ini, sebenarnya penghematan 19 triliun itu artinya bagaimana, harus ada parameter-parameter yang menjelaskan bahwa, memang 19 triliun, di berita 11 Agustus 19 triliun Bu pemotongannya. Ini 19 triliun ini maksudnya bagaimana, dia berubah menjadi apa.

Kalau memang apa yang dihasilkan itu sesuai juga dengan segitu, ya artinya tidak masalah, artinya efisiensi sangat hebat sekali yang dilakukan oleh BRIN, prestasi, *top*, tetapi kalau hanya pemotongan anggaran saja untuk mengurangi belanja pegawai, saya kira ya setidaknya dibutuhkan ya efisiensi dan ini juga sangat berhubungan dengan apa yang bisa dilakukan BRIN untuk masyarakat, efisiensi anggaran penelitian, efisiensi anggaran inovasi, karena masyarakat Indonesia itu sangat membutuhkan sekali kehadiran BRIN, apalagi dengan kondisi seperti yang saat ini. Dengan kondisi internasional yang Indonesia juga tidak bisa terlalu banyak berkontribusi ataupun dalam hal-hal yang lain.

Saya kira, penelitian dan inovasi menjadi ujung tombak untuk menjadi solusi kepada masyarakat secara langsung, karena yang namanya peneliti itu adalah peneliti-peneliti yang untuk masa depan, untuk orang banyak.

Sekali lagi, saya tidak pernah meragukan kemampuan individual para peneliti Indonesia, apalagi Bapak/Bapak dan Ibu/Ibu yang ada di dalam BRIN ini, hanya saja saya mempertanyakan bagaimana Bapak/Bapak dan Ibu/Ibu di dalam BRIN ini bisa bergerak sebagai sebuah organisasi bangsa untuk memajukan masyarakat, untuk berkontribusi untuk masyarakat, dan untuk menjadi wajah terdepan Indonesia dalam hal penelitian dan IPTEK.

Mungkin itu saja Pimpinan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.

*Wabillahi taufik wal hidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/
WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Walaikumsalam,

Terima kasih.

Dilanjutkan dari Fraksi PKB, dari PKB belum ada, dari Demokrat udah siap-siap daritadi Pak Satrono.

F – DEMOKRAT (SARTONO, S.E., M.M.):

Terima kasih.

Pimpinan yang kami hormati,
Para sahabat Komisi VII yang kami hormati,
Bapak Kepala BRIN dan seluruh jajaran,
Kepala BIG,
Kepala BAPETEN, dan

BPPT, LAPAN, LIPI ndak ada Pak ya, terpisah, ada juga. Baik.

Yang kami hormati semuanya,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Sebelum saya nanti pendalaman tentang laporan keuangan di 2021, saya agak sedikit apa me, mengingatkan saja gitu Bapak Kepala BRIN. Tugas BRIN ini kan menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi.

Nah ini apa setahun ini kita agak tertunda hal ini kan karena terintegrasi ini ya, ini yang juga menjadi harus apa mohon nanti sampai di mana juga perlu di terangkan sampai di mana apa itu perpaduan atau terintegrasi daripada tugas BRIN ini, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BRIN.

Bapak Kepala BRIN, saya beberapa saat yang lalu, di akhir bulan lah begitu, saya membaca suatu berita lah begitu bahwa, peneliti BRIN itu

mengadakan penelitian dan mengungkapkan apa tentang apa masyarakat yang menggunakan daripada konsumsi apa minyak, minyak goreng itu. Di dalam penelitian itu mengatakan bahwa, katanya masyarakat mengubah metode masak menjadi merebus, mengukus atau memanggang kata dia dalam acara webinar, Kamis, 28-7-2022.

Kami mengingatkan bahwa, apakah itu juga bagian daripada apa riset dan penelitian gitu. Dan saya waktu itu ditanya Detik saya sampaikan, kalau hal itu penelitian apa yang triliun-triliun ini menemukan inovasi ya untuk penelitian dan invensi, terus meneliti tentang apa, apa itu masyarakat ya, iya iya, dari menggoreng terus juga apa mengukus dan sebagainya, apakah disitu itu tepat begitu. Saya sampaikan, itu terlalu kecil kalau kita mengadakan riset untuk itu, dia tugasnya bukan di situ saya pikir. Kalau ada survey itu survey bagi saya, serahkan aja kepada survey begitu kan, itu pertama.

Kedua, saya juga membaca tadi di *tweet* lah begitu ya, tentang BRIN bikin *statement*, ini-ini sebetulnya lebih kepada politis itu, ini apa **safa** apa itu **terkuak** safari ke sejumlah tokoh, BRIN ingin naikan status jadi simbol Islam baru. Ini mengapa ini, ini jangan ditarik-tarik ke politik lah, ini benar tidak, saya ingin juga konfirmasi lah begitu.

Jadi apa BRIN harus betul-betul jangan apa tertarik ya ditarik gitu mau, harus fokus kepada tugas-tugas pokok itu, penelitian, inovasi, riset, jadi harus disitulah begitu. Ini kalau, kalau ke situ kan apa ya jadi pengamat politik saja begitu. Ini, ini yang juga sebetulnya kami mengingatkan kepada Bapak Kepala BRIN di forum yang terhormat ini ya sebelum kita melakukan pendalaman-pendalaman laporan keuangan daripada BRIN itu.

Untuk sementara itu, akan dilanjutkan Pimpinan ke sahabat saya Hendrik, mungkin Pak Hendrik silakan.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Ini pengecualian ini, minta jangan terlalu lama ini, jatah waktunya 5 menit.

F – P. DEMOKRAT (SARTONO, S.E., M.M.):

Kalau begitu putar aja dulu, silahkan.

Terima kasih, Pimpinan.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Siap, silakan dari PKS. Pak Mul udah nunggu dari tadi.

F – PKS (Dr. H. MULYANTO, M.Eng.):

Baik. Pimpinan, terima kasih.

Atas seizin Bapak Pimpinan saya, Bapak Menteri Tifatul, nanti beliau akan pantun sudah barang tentu, saya juga akan pantun sedikit.

*Ikan sepat, Ikan gabus,
Ga usah pakai ikan lele,
Makin cepat makin bagus,
Tidak usah bertele-tele,*

Yang penting apa program kemasyarakatan hasilnya lancar.

Bapak/Ibu sekalian,

Terus terang saya prihatin dengan PDB-nya BRIN dan LIPI, saya masih ingat tahun 2014 ke belakang sebelum LIPI menjadi WTP saya ada di sana untuk menjadikan WDP untuk WTP itu berat sekali, itu soalnya Kebun Raya evaluasinya. Pak Lukman Hakim ingin mengevaluasi diminta oleh BPK, kebun raya masing-masing pohonnya di evaluasi berapa rupiah itu, itu hambatan gajadi WTP, saya masih ingat betul. Namun *alhamdulillah* akhirnya berhasil, LIPI mendapat WTP.

Nah, saya melihat sekarang itu dari WTP ke WDP turunnyagampang bener gitu ya, karena hal-hal yang relatif sepele, kok turun jadi WDP gitu, harusnya dikomunikasikan dengan baik. Nah terus terang, saya ada kekhawatiran di 2022 nya, ini kan masa masih relatif lah ya masanya masa normal sebetulnya, 2002 masa *up normal* transisi, konsolidasi anggaran belum rapih sehingga yang ketarik cuman 7 triliun tadi ya, nyangkut di litbang teknis masih banyak, bukan efisiensi Pak, itu mah ketarik ya anggarannya, kita butuh anggaran lebih besar lagi untuk riset begini.

Kemudian terkait SDM. Kemarin permasalahannya ya permasalahan SDM kita, penelitiannya dengan Kementerian PAN, kemudian lagi persoalan aset, gedung, aset lab *wah* yang masih nggak jelas. Ini kalau tidak hati-hati *wah* bukan hanya WDP, saya khawatir turun lagi, bahaya itu. 2021 *relatifly* ya ga sekompleks permasalahan ini, sekarang ini kompleks luar biasa, sehingga mohon mendapat perhatian ketika berkomunikasi dengan BPK benar-benar bagus sehingga bisa dilokalisir mana permasalahan-permasalahan dan diselesaikan dengan baik, saya khawatir ini dari segi ini hanya baru administrasi sebenarnya WTP, WDP itu.

Yang kedua soal komunikasi memang intinya. Saya membaca berita dan juga ditanya beberapa wartawan, membaca juga, melihat lah ya *video* YouTube tentang Inki, wah disitu dramatis sekali kan kondisinya. Terjadi sidak Deputi Infrastruktur Bapak Yan Rianto, ya saya kenal juga orang ini Pak Yan Rianto, kawan saya di Jepang. Kepala BAPETEN sama kampusnya, saya sering dateng ke kampus itu.

Sepertinya, wah ini serem ini, saya ada di sana karena dari jaman dahulu ya ini soal biasa-biasa aja sebetulnya, Inuki kan lembaga yang kita inginkan ya karena dulu belum ada BLU kita dorong, Bu Andi, agar kita bisa menghasilkan komersialisasi, *vehicle* nya kan BLU, tapi dibatas maju, bukan hanya BLU, ada sebuah BUMN yang kita desain, saya rasa paling maju di antara seluruh komponen ristek kita, luar biasa itu namanya Inukisu BUMN nuklir, BBPT aja enggak ada, enggak ada BLU ya, LIPI juga enggak ada.

Nah, namun dalam perjalanan sejarahnya terlihat kinerjanya kurang berkembang dengan baik. Jadi uang kantong kiri dari BATAN diserahkan ke Inuki buat bahan bakar dikembalikan lagi ke BATAN. Peralatannya punya BATAN, ruangnya punya BATAN, orangnya punya BATAN semua, semua dari BATAN dan sebagainya. Saya lihat memang Inuki gak berkembang ya, *core* bisnisnya itu hanya **target** *market* BATAN.

Cita-cita kita untuk mengembangkan apa komersialisasi teknologi nuklir kurang berhasil, padahal BATAN sendiri bisa melakukan itu sesungguhnya sehingga menurut saya ini perlu dibicarakan dengan baik, komunikasinya yang baik, termasuk dengan Kementerian BUMN.

Saya baca, Bapak Kepala BRIN sudah membuat surat tapi ga dijawab atau belum dijawab, ya mungkin juga ga mendapat prioritas. Karena kalau di suasana BUMN, terus terang saya pernah di BUMN juga ya **...(suara tidak jelas 01.29.05)** BUMN, lebih asik dengan yang besar-besar kan. Nah ini mohon apa mendapat penyelesaiannya yang baik, jangan sampai **SDM**-nya kecewa ya. Kalau memang harusnya di, dibubarkan misalnya, biar bisa diserap kembali ke BRIN ya pegawai-pegawainya, sehingga bisa bekerja di sana.

Termasuk juga rencana *shutdown* dari reaktor **362**, ini dikomunikasinya juga harus dengan baik menurut saya, karena saya masih ingat waktu **(suara tidak jelas ... 01.29.45)** di sana kita naikkan jadi 1.000 megawatt kan, lalu akhirnya memang usianya juga sudah terlalu tua ya, ini mohon dikomunikasikan dengan baik kepada apa para peneliti, sehingga memang sudah sewajarnya lah di, ini di *komisioning* misalnya, tidak lagi dipanjang umurnya.

Jadi itu Pak Handoko, secara umum kami lihat komunikasi dengan masyarakat, dengan para peneliti ya harus lebih ditingkatkan. Karena persoalannya banyak di era transisi ini konsolidasinya belum penuh masih berjalan, terseok-seok, karenanya kita tidak ingin muncul permasalahan-permasalahan baru, apalagi yang terkait administratif ini ya. WDP walaupun administratif ini **(suara tidak jelas ... 01.30.39)** di lihat ini, WTP menjadi WDP luar biasa, kami sendiri harus melaporkan ke BAKN sini ya, harus melaporkan kalau WDP ini, ini soal serius akhirnya. Mohon mendapatkan perhatian untk nanti di 2022.

Demikian, Pimpinan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/
WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Walaikumsalam,

Terima kasih, Pak Mulyanto dari Fraksi PKS.

Di lanjutkan dari Fraksi PAN. Silahkan, Bu Andi.

F – PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc):

Terima kasih, Pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan, Pak Dony, kemudian
Seluruh Anggota Komisi VII,

Pertama, saya ingin membacakan opini LK 2021, dimana LIPI tadi sudah disebutkan WDP dan BRIN juga WDP di 2021 ya, ini saya lengkap Pak datanya di seluruh LPSK.

Jadi BRIN itu sudah 2021, karena Bapak kan dilantik 28 April 2021, jadi dari April ke Mei eh dari April ke Desember sudah dievaluasi BRIN, dan BRIN WDP juga. Saya enggak tau, mudah-mudahan di 2022 tidak WDP lagi. Jadi kalau, Bapak harus mengevaluasi kenapa bisa WDP ya, di kepemimpinan Bapak LIPI WDP, BRIN di kepemimpinan Pak Handoko WDP juga ya.

Nah, saya juga akan membacakan kenapa walaupun Bapak tidak menjelaskan temuan WDP di LIPI. Pertama adalah penggunaan langsung atas pendapatan dan pemeriksaan RT-PCR tahun 2021 dari rumah sakit dan laboratorium di PPI sebesar Rp4,2 miliar. Kemudian, PPI ini selaku pengelola bukan satker yang berupa BLU. Penggunaan tersebut digunakan antara lain untuk operasional pada laboratorium BSL-2 dan BSL-3. Hal tersebut mengakibatkan, penerimaan negara bukan pajak pada IRA per 1 Desember 21, 2021 kurang saji sebesar Rp4,2 miliar.

Kemudian, BPK merekomendasikan kepada Kepala BRIN. Makanya disini laporannya harus dirubah ini Pak setiap tahun LIPI atau BRIN sekarang, BAPETEN, BIG, jangan hanya menyatakan sudah di rekomendasi temuannya. Kalau kemarin dengan SDM disebutkan temuannya apa, rekomendasi apa, telah diselesaikan apa, ya ini engga ada ini ya.

Nah, di sini BPK merekomendasikan kepada Kepala BRIN antara lain, menetapkan kebijakan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, mendominasi ketentuan yang berlaku ya. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Deputy Infrastruktur Riset dan Inovasi satuan kerja sesuai organisasi dan tata kerja terbaru selaku KPA tahun 2021 yang menggunakan langsung penerimaan dana kerja dengan kerjasama pemeriksaan RT-PCR tahun.

Saya lengkap Pak, semua data temuan BPK terhadap LIPI ya. Kemudian juga pengelolaan Kebun Raya ya yang kerjasama dengan perusahaan. Belum lagi Pak, Bapak ini kan dapat peringatan juga Komisi Ombudsman ya. Komisi Ombudsman memberikan peringatan kepada BRIN untuk menyikapi per 30 hari di 1 Juli saya dapat infonya untuk menyikapi dugaan mal administrasi yang dilakukan oleh badan riset inovasi nasional.

Belum lagi, di Kompas *headline* terus berita BRIN terkait dengan banyak periset BRIN setahun nganggur. Ya mungkin karena tadi menghemat anggaran ya jadi banyak yang menganggur. Kemudian, ada juga di sini dari berita bahwa, sebenarnya kan *drone* itu adalah salah satu proyek strategis, riset strategis. Nah ternyata *drone* elang ini juga bubar ya, dimana di Kompas disampaikan sejumlah riset, sejumlah daftar riset strategisnya tersendat. Justru kita harapkan dengan adanya BRIN ini maju inovasi-inovasi.

Kemudian, ekosistem riset Pak. Jadi salah satu hal yang penting sebelum Bapak dilantik saya sempat memperingatkan, tolong Pak ekosistemnya diperbaiki terlebih dahulu, itu nomor satu, ternyata Bapak juga mendapatkan rapat merah terkait dengan ekosistem riset saat ini di bawah kendali Pak Handoko.

Tentunya saya juga berharap bahwa, di tahun 2021 temuan-temuan BPK ini menjadi hal yang paling penting, Pak. Jadi tidak bisa seenaknya bahwa, oke kita punya penerimaan negara bukan pajak, kemudian karena terburu-buru harus ada riset, kemudian dipakai untuk membeli kalau ga salah tadi virus ya, engga bisa seperti itu Pak, itu sudah mal administrasi ya, jadi nggak bisa.

Nah, apalagi kalau saya nanyakan, tadi Pak Handoko tidak pernah menjelaskan selama presentasi terkait dengan vaksin merah putih, apa sudah hilang vaksin merah putih. Tiba-tiba tidak bi, tidak diperhatikan lagi karena periset-periset dari lembaga Eijkmannya kan juga sudah-sudah tidak berniat lagi untuk meneruskan di bawah model seperti ini.

Nah kemudian BRINDA, BRIN, BRINDA. Saya pernah, saya termasuk orang yang tidak setuju dengan adanya BRINDA ini. Kenapa, provinsi kan sudah punya badan litbang, pasti bapak akan bilang "Oh kita engga bisa kasih uang kepada Badan Litbang". Oke, kalau gitu sampaikan kepada Menteri, Menteri dalam negeri bikin aturan, bikin edaran, hapuskan semua litbang ada di semua provinsi, gantikan oleh badan riset daerah, hapuskan, tapi ini harus ada badan hukumnya. Bapak juga buat riset inovasi daerah kan saya juga engga tau, saya mau ngintip bagaimana konsultasi terkait dengan kelembagaan baik dengan Menpan, dengan Kementerian Dalam Negeri.

Nah kemudian yang terakhir, tadi sudah disampaikan. Inilah Pak, komunikasi di dalam itu apa yang ada di kepala Bapak sebagai Kepala BRIN, di level tengah sampai level pelaksana itu sama bunyinya A semua, jangan sampai Bapak A, di bawah B, C, sampai di bawah ngomong di tenaga ahli D, ini terjadi. Bagaimana mau membuat satu ekosistem riset yang baik ya.

Makanya tadi saya tanyakan, inovasi-inovasi apa sih yang ada di bawah kepemimpinan selama kepemimpinan Pak Handoko ini gitu loh. Coba berikan saya inovasi terkait juga dengan strategis nasional ini mana yang sudah terlaksana saat ini. Ya mungkin dibagi, yang strategis mana saja, kemudian inovasi daerah mana saja ya, ini bisa dipresentasikan kepada kami dan juga saya ingin secara detail apa sih yang sudah Bapak lakukan, tidak dengan angka-angka seperti ini sudah direkomendasi, masih dalam proses, belum ditindaklanjuti, rata-rata kan semua sudah dalam proses nih 2021, 36 ya. Nah kira-kira apa yang, saya punya temuan BPK, rekomendasi BPK saya punya, tapi kan harusnya semua anggota Komisi VII tau apa yang menjadi temuan BPK, yang harus Bapak sajikan di dalam laporan 2021, kemudian apa rekomendasi yang sudah Bapak laksanakan.

Kemarin kami juga melakukan hal yang sama dengan Kementerian ESDM, tapi kami bisa membaca terkait temuan BPK ini, yang sedang direkomendasikan, yang sudah direkomendasikan ini, yang kami sedang atau ESDM laksanakan ini, tapi ini hanya angka-angka.

Tolong ini diperbaiki, kita harus transparan, Pak ya. Karena, BRIN ini adalah mitra kerja Komisi VII. Kita akan membantu Pak, mitra Komisi VII, mitra Bapak itu bukan ada pihak-pihak yang di luar sana gitu loh.

Ini catatan saya sebetulnya masih banyak, tolong perbaiki ekosistem, kalau tidak Bapak akan dapat WDP lagi di 2022 dan kita yang malu Pak Ketua kalau mitra kerja kita ada WDP, berarti kita tidak melakukan fungsi pengawasan secara benar. Kalau mitra kerja kita mendapatkan WDP, Komisi VII yang salah karena kita tidak memberikan pengawasan secara benar, secara tepat kepada mitra kerja kami. Jadi tolong di 2022 saya enggak mau lihat lagi BRIN ada WDP. Di 2021 kan LIPI WDP, BRIN WDP. Tolong, tolong, tolong.

Tulisan di Kompas itu Pak, saya mungkin tidak hoax ya kalau Kompas yang menulis, tolong diperhatikan, periset banyak yang menganggur, ekosistem riset rusak, itu semua tulisan di Kompas. Saya juga minta jawaban secara tertulis apa Bapak sampaikan secara luas apa yang telah Bapak lakukan terkait dengan rekomendasi atau permintaan dari Komisi Ombusman, Bapak sudah dikasih 30 hari per 1 Juli saya lihat berita itu.

Terima kasih, untuk 2022 tolong Bapak laksanakan sesuai kesepakatan, hitung kembali ya.

Demikian.

*Billahi taufik wal hidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/
WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Walaikumsalam,



Terima kasih, Ibu Andi Paris dari Fraksi PAN.

Selanjutnya dari Fraksi PPP, ndak ada ya. Kita satu putaran lagi ya. Dari Fraksi PDI Perjuangan siapa, oh Bu Mitaa silahkan.

F – PDI PERJUANGAN (PARAMITA WIDYA KUSUMA, S.E.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang saya hormati Pimpinan Komisi VII, Rekan-Rekan Komisi VII, dan Yang saya hormati Kepala BRIN beserta jajarannya,

Yang saya tanyakan itu terkait kegiatan tahun 2022 yang ingin, saya ingin mengapresiasi kegiatan-kegiatan bintek yang sudah dilakukan oleh BRIN, termasuk juga di Dapil saya kemarin, pesertanya *alhamdulillah* cukup banyak dan pesertanya semuanya antusias menerima paparan dari para peneliti dari BRIN.

Namun sebenarnya, mereka ini mengharapkan tindak lanjut dari pelatihan-pelatihan tersebut, Pak. Misalnya kemarin kita diberikan pelatihan pisang abaka, budidaya pisang abaka, tapi tidak ada bibit yang diberikan oleh pesertanya. Mudah-mudahan nanti selanjutnya pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh BRIN ini ada bentuk yang diberikan, seperti bibitnya atau alatnya atau apa begitu, Pak. Tapi, saya sangat mengapresiasi ini kegiatan yang sangat baik sekali.

Kemudian terkait pembentukan badan riset daerah, baik di tingkat provinsi dan kabupaten. Saya ingin menanyakan, apa saja 35 lembaga BRIN dalam-dalam mengabulkan permintaan dari provinsi dan kabupaten/kota untuk membentuk badan riset di daerah mereka. Karena dalam paparan yang disampaikan, saya lihat di Jawa Tengah hanya ada 3 kabupaten/kota saja yang menyampaikan permohonan pembentukan BRIN, padahal mungkin semua wilayah menginginkan pendirian BRIN supaya ada yang memfasilitasi riset dan inovasi yang dilakukan oleh daerah tersebut. Mungkin itu saja, Pimpinan.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Walaikumsalam,

Terima kasih, Ibu Paramitha.

Dilanjutkan dengan Fraksi Golkar, tidak ada. Fraksi Gerindra? Yang virtual Fraksi Gerindra ada yang mau bicara, tidak ada. Kemudian dari Fraksi Nasdem sila, apa dari Fraksi Nasdem ada lagi yang mau bicara?

F – NASDEM (RICO SIA):

30 detik aja, Pimpinan.

**KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI
PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Bener ya, saya hitung nih kalau mau.

F – P. NASDEM (RICO SIA):

Siap, boleh-boleh 30 detik aja.

**KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI
PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Silahkan Pak Rico.

F – P. NASDEM (RICO SIA):

Terima kasih, Pimpinan.

Izin, langsung kepada Bapak Kepala BRIN, ini terkait dengan program barista yang sudah berjalan. Terima kasih dari Papua Barat sudah ada jawabannya dan mungkin tinggal tunggu SK-nya ya.

Nah, yang saya maksudkan adalah terkait dengan *lex specialis* Undang-Undang Otsus Nomor 2, kalau boleh juga kepada Pimpinan dan rekan-rekan sekalian, saya mohon tambahan kalau boleh karena pada saat kita buat Undang-Undang Otsus itu, kami sudah berjanji cukup banyak kepada masyarakat sehingga kalau boleh untuk terkait dengan program barista dari Papua maupun Papua Barat, kalau boleh ditambahkan mungkin kalau biasanya ada 80, mungkin dari Dapil kami karena waktu itu kami berjanji cukup banyak terkait dengan Undang-Undang Otsus mungkin bisa ditambahkan digenapkan 100.

Mungkin itu saja, Pimpinan. 30 detik kan nyampe ya.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI
PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Makasih. Terima kasih, Pak Rico. Di hitungan saja ini 55 detik, Pak.

Di lanjutkan Fraksi PKB, tidak ada. Fraksi Demokrat, silakan Pak.

F – P. DEMOKRAT (Drs. HENDRIK HALOMOAN SITOMPUL, M.M.):

Terima kasih, Pimpinan.

Selamat siang,
Salam sejahtera untuk kita semua,

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi VII yang hadir pada *meeting* hari ini, serta buat Kepala BRIN, salam hormat Pak.

Terima kasih Pak.

Kepala, Kepala BIG ya, Kepala BAPETEN.

Terima kasih atas kehadirannya di ruang Komisi VII ini.

Memahami apa yang disampaikan, dipaparkan oleh Bapak BRIN terkait dengan anggaran, laporan keuangan ini. Saya melihat focus kepada temuan BPK aja, Pak. Saya lihat dari tahun ke tahun tetap ada dan muncul, baik itu di Lembaga-lembaga di bawah Bapak gitu ya, baik di LIPI, LAPAN gitu ya, semua saya lihat ada temuan-temuan begitu.

Terima kasih mungkin sudah ada rekomendasi dan tindak lanjutnya gitu, tetapi saya justru berbalik, Pak Kepala. Saya mau tau, kenapa itu terjadi gitu sebenarnya. Karena kalau tau kita asal muasalnya, sehingga nanti ke depan per tahun per tahun tidak akan muncul lagi, jadi temuan-temuan tidak muncul. Jangan jadi, saya harapkan jangan temuan ini jadi budaya, oh setiap terus ada temuan saya kira ndak baik juga seperti itu, menurut saya ini Pak.

Jadi boleh lah kita tau secara tertulis, Pak Kepala, apa 37embaga-alasannya, kenapa bisa terjadi seperti ini, apakah karena memang regulasinya atau karena kebijakan lain. Saya kira kan tidak semua, mungkin di BRIN atau 37embaga lain salah, tapi mungkin ada yang *stakeholder* lain begitu.

Jadi, kita bermohon supaya data-data yang terkait temuan-temuan ini kenapa terjadi, saya minta kenapa terjadi aja, Pak. Kenapa ini bisa terjadi, supaya ini tidak terulang lagi. Saya kira itu buat temuan-temuan ini.

Dan untuk, ini untuk semua gitu ya Pak, ini kita bacain supaya, supaya ini kita lebih baik lah laporan keuangan kita ke depan supaya lebih baik, karena kita harus tau titik masalahnya apa gitu. Jadi jangan, tidak boleh melakukan pembiaran, saya kira begitu. Harus, harus kita *detect* sejak awal, kenapa ini terjadi gitu supaya baik kedepannya. Karena yang Bapak/Bapak kelola itu adalah uang rakyat, uang rakyat yang harus dikelola baik, karena bapak diberikan amanah untuk mengelola uang rakyat tersebut.

Berikutnya untuk geospasial ya, Pak. Pak BIG, Pak Kepala BIG. Saya ndak ada melihat masuk ke Dapil saya Pak, dapil saya itu, saya Hendrik Sitompul, Dapil saya itu Sumut I, Medan, Deli Serdang, Tebing, ndak ada objek

sasaran yang dikerjakan di dapil saya, saya lihat. Ini kelihatannya lebih banyak, di Jawa gitu ya, kami kan juga termasuk NKRI, Pak. Jadi tolong lah Sumut I juga bisa, mohon izin Pak Menteri, bisa menjadi objek sasaran.

Karena, saya sampaikan juga Pak Kepala, Medan itu sangat irisan dengan nama Deli Serdang. Jadi Kota Medan itu dia dikelilingi Deli Serdang. Jadi sering masyarakat mengeluh kepada kita, padahal surat-surat mereka itu sudah ada di Medan, tapi ketika dia titik, titik apanya, Deli Serdang Pak, ini kan problem ini. Jadi titik objek tanahnya itu Deli Serdang, padahal Pemko Medan sudah mengeluarkan surat-surat IMB segala sudah keluar, tetapi ketika melihat objek tanahnya, karena SK, SK-nya, SK camat gitu ya, tapi ketika dilihat ke objeknya, wah itu Deli Serdang. Nah, ini saya kira ini karena belum apa ya namanya geospasial belum turun tangan kelihatannya ini.

Nah, jadi Medan itu Pak, Kota Medan itu dikelilingi Deli Serdang dia, ada Serdang Badagai ini, jadi batas-batas ini sering apa tidak jelas gitu, jadi kadang-kadang masyarakat itu bingung, kami dimana nih, padahal kami sudah dekat sekali dengan area kabupaten lain gitu. Itu saya kira titip buat, buat kami Sumut 1 Pak Menteri, izin Pak Menteri supaya kebaikan buat konstituen kita.

Terus, berikutnya saya juga mohon penjelasan kegiatan BRIN, BATAN, BPPT, LIPI, *output* strategis 2021 sudah yang sudah dan belum dilaksanakan gitu, Pak Kepala. Saya kira mudah lah itu ya, terus bagaimana sisi pengendalian memadai BRIN, BPPT, LAPAN, BPK menemukan kelemahan pengendalian intern walaupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan keuangan di Kemenristek BRIN, BATAN, LAPAN, LIPI tahun 2021, saya kira itu yang perlu dijelaskan kepada kami.

Yang terakhir, bagaimana cara kerja sistem informasi pengawasan partisipasi BRIN, BATAN, BPPT, LAPAN, LIPI melalui pengembangan sistem informasi berbasis partisipatif SDM dan *stakeholder* nya. Saya kira gitu aja yang bisa kami sampaikan dari Fraksi Demokrat.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN /WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Terima kasih, Pak Hendrik.

Dilanjutkan dari Fraksi PKS. Pak Tif silahkan Pak, cukup? Tumben, ga bisa dengerin pantunnya Pak Menteri. Oke, lanjut lagi Fraksi PAN, oh Bu Andi udah cukup kayanya nih, dari Fraksi PPP juga tidak ada, saya pikir cukup Pak ya.

Kalau dari apa yang disampaikan oleh rekan-rekan tadi, teman-teman tadi banyak kritikan-kritikan mengenai 2021 tadi mengenai WDP tadi, Pak Kepala BRIN dan juga dari LIPI, karena dua poin ini juga sangat apa yang seperti disampaikan Bu Andi tadi, kok kita jadi sebagai pengawas tidak kok

sampai WDP ini, kita juga akan dipertanyakan Pak nanti. Jadi mohon juga sebagai perhatian yang serius sekali mengenai WDP ini, Pak.

Kedua mengenai tadi dari anggota, program untuk kemasyarakatan tadi yang nilainya kurang lebih sekitar 1,6 triliun tadi, itu juga realisasinya seperti apa. Ini sepertinya kepentingan anggota semua, arahnya apa yang mereka bisa berikan kepada masyarakatnya yang karena kami langsung lah berhadapan dengan masyarakat, gitu ya kira-kira. Wuh semangat sekali, temen-temen kalau urusan begitu udah urusan Dapil, tapi jujur Pak saya mohon nanti dijelaskan lagi kepada kami nanti programnya seperti apa Pak, nanti supaya jelas.

Memang kita tau tadi, sempet kita berdiskusi, jadi memang kami butuh penjelasan dan komunikasi juga ke bawah supaya nyambung, Pak. Karena kami yang mengurus ke lapangan, kami yang berhadapan dengan masyarakat, apa yang kami bawa, apa yang kami terima, yang bawa itu adalah apa yang disampaikan kepada kami. Anggota Komisi VII menerima masukan dari Kepala BRIN misalnya, ini apa yang bisa dibawa ke daerah, itu lah yang kami bawa. Pada saat itu yang kami janjikan dan kami kembali proses ke bawah dari apa namanya dari Departemen ini sendiri tidak nyambung akhirnya *dispute* di bawah.

Nah, saya pikir ini komunikasinya juga diantara apa dari atas ke bawah satu, satu suara lah supaya sama apa yang disampaikan oleh Kepala dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman di bawah di jajaran BRIN dengan TA-TA kami yang mengurus supaya seirama, jadi itu benar ya kira-kira ya.

Jadi, mohon nanti dimasukkan di dalam kesimpulan untuk yang 2022 juga melaksanakan poin kesimpulan di hasil *konsinyering* kita, disitu jelas bahwasanya 1,6 triliun itu adalah program untuk kepentingan masyarakat. Nah itu juga, jadi kami mohon untuk BRIN bisa melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya.

Nah, selanjutnya kami persilakan dari Kepala BRIN atau nanti disambung dengan Kepala BIG, BIG dan Kepala BAPETEN untuk bisa menjawab dan nanti ada poin-poin yang butuh data kami juga diberikan data secara tertulis. Silahkan, Pak Kepala.

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (Dr. LAKSANA TRI HANDOKO, M.Sc.):

Terima kasih.

Bapak Pimpinan dan Bapak/Ibu Anggota Komisi VII yang kami hormati,

Jadi kami menerima masukan dan tadi dukungan terima kasih sekali dan khusus untuk terkait penjelasan program itu akan kami tuliskan lebih komperhensif, karena memang itu terdiri dari berbagai komponen seperti tadi sudah didiskusikan sebelumnya. Jadi memang tidak *single* komponen, karena

memang tidak memungkinkan kalau secara nomenklatur anggaran dan itu nanti akan kami sampaikan ke Bapak/Ibu Anggota dan juga TA masing-masing.

Kemudian terkait dengan apa status WDP di apa yang kemarin di Kemristek BRIN dan LIPI dan itu tentu menjadi catatan kami dan jadi koreksi kami ke depan, dan saya sangat, kami sangat menghargai masukan dari Pak Mulyanto tadi bahwa, komunikasi dengan BPK harus diperkuat juga karena misalnya contohnya yang di LIPI itu kan kasusnya adalah 4,2 miliar masuknya bukan PNPB memang tapi di RPL yang sebenarnya itu sudah disetujui oleh Kementerian Keuangan gitu, tetapi ya karena waktu itu kondisi *pandemic*, tetapi itu yang dilihat oleh BPK RI tidak boleh lagi. Jadi sehingga secara pertanggungjawaban keuangan itu dapat dipertanggungjawabkan, tetapi secara administrasi memang itu menjadi tidak *comply* dengan regulasi yang ada.

Kemudian untuk apa, saya akan berupaya singkat menyampaikan terkait dengan tidak ada tidak temuan tadi dari Pak Hendrik kalau tidak salah, jadi ya kami khususnya temuan yang berulang yang selalu kami-kami upayakan untuk tidak terjadi lagi, karena temuan berulang berarti itu bukan berarti kami tidak melakukan apa-apa begitu ya itu, tapi yang kasus apa meskipun itu temuan administratif tetapi memang kami akui saat itu bahwa BPK RI waktu itu juga material yang 4,2 miliar itu, karena memang perbedaan pemakaian rekening.

Kemudian, saya sampaikan informasi secara singkat terkait pertanyaan Pak Bambang dari PDIP tadi bahwa, apa untuk TTG di kami saat ini ada total kurang lebih itu 34,1 miliar, yaitu yang terkait dengan risetnya secara langsung maupun dengan apa program hilirisasinya.

Kemudian apa untuk wajah festival riset untuk mengapresiasi inovator di luar lingkungan kampus itu kami juga sebenarnya adakan. Jadi ini nanti kami akan informasikan ke Bapak/Ibu Anggota juga, kami akan adakan *inshaa* Allah di akhir tahun pada saat riset and *Innovation Expo*.

Kemudian ya terkait dengan apa ini ya kendala untuk strategi agar bisa optimal penyerapan anggaran kami. Jadi perlu kami sampaikan bahwa, sebagian besar belanja BRIN itu memang isinya ada belanja modal, sehingga secara karakter itu memang penyerapan itu biasanya ada di triwulan keempat. Jadi kami apa cukup apa yakin bahwa di triwulan keempat penyerapannya akan kami akan cukup baik.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Triwulan keempat itu mepet sekali itu, Pak ya.

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (Dr. LAKSANA TRI HANDOKO, M.Sc.):

Iya, karena kan berpengaruh selesai kontrak ya Pak ya. Kalau bangun gedung gitu harus selesai BAST baru bisa dibayarkan gitu ya.

Kemudian, ya untuk terkait dengan apa penghematan yang di media, yang 19 triliun itu, itu sebenarnya maknanya adalah penghematan dari sisi laporan keuangan ya dari sisi keuangan, karena selama ini memang perkasus pada tahun anggaran 2018 itu anggaran waktu itu namanya BPK IPTEK itu total 26 Triliun. Kemudian saat ini yang program yang disebut dengan riset dan inovasi pengganti BPK IPTEK itu memang tinggal 7 sampai 8 Triliun.

Jadi nah itulah yang kemudian oleh Kementerian Keuangan memang apa diinterpretasikan sebagai bentuk penghematan. Artinya sebenarnya, terbuka potensi bagi kami untuk memperbesar anggaran karena memang ada program dengan justifikasi yang cukup kuat gitu.

Jadi, kemudian untuk yang terkait dengan apa tadi yang tadi Pak Akram mungkin sudah saya jawab terkait dengan. Kemudian dari Pak Sartono, iya. Jadi, ini mohon maaf sekali kami juga baru tau misalnya ada *statement-statement* di twitter yang dalam "Periset BRIN". Jadi misalnya yang disampaikan terkait apa ini minyak goreng diganti merebus dan lain-lain, kemudian ada yang seperti pengamat politik dan sebagainya, jadi itu kami pastikan bahwa itu adalah individu.

Jadi kami di internal itu memang menyampaikan ke teman-teman periset bahwa mereka harus bisa membedakan, apa, pernyataan sebagai individu atau pernyataan sebagai periset BRIN, tetapi ini akan segera kami lakukan ke teman-teman supaya lebih berhati-hati lagi kedepannya.

Kemudian untuk Inuki tadi yang sudah disampaikan Pak Mulyanto juga. Jadi sebenarnya kami sudah bertemu, kami sudah berdiskusi berkali-kali sebenarnya sejak tahun lalu dengan Pak Erick, Menteri BUMN dengan Pak Pahala Wamen BUMN juga, selain kami berkirin surat juga dan kami juga termasuk dengan Direktur Inuki dan yang terakhir itu tanggal 22 Agustus hari Senin kemarin kami sudah ketemu, kita temukan langsung semua pihak dan di situ memang PT Inuki berkomitmen untuk mensegerakan penandatanganan PKS nya dan sebelum penandatanganan PKS dilakukan mereka akan menghentikan opsionalnya terlebih dahulu, karena ini sesuai dengan standar keamanan agar nanti PT Inuki tidak bermasalah juga dengan teman-teman di BAPETEN yang terkait dengan standar keamanan kawasan nuklir, yang kebetulan itu ada di kawasan kami yang ada di BRIN yang ada di Serpong.

Jadi dan yang kedua, kami sejak tahun lalu sudah menyampaikan ke Menteri BUMN bahwa BRIN sebenarnya berkomitmen kalau perlu kami membantu PT Inuki untuk melakukan *dekontaminasi* dan pembersihan limbah yang selama ini memang belum pernah mereka proses gitu dan itu sangat mengganggu dan tentu itu tidak sesuai standar keamanan kawasan nuklir, tetapi sebelum ada persetujuan Kementerian BUMN secara tertulis tentu kami belum bisa melakukan, karena itu adalah masih statusnya itu adalah aset dari PT Inuki sebagai BUMN.

Jadi, tetapi kami berharap melalui pertemuan kemarin PT Inuki bisa segera beroperasi kembali dan kami sebenarnya sudah menyiapkan modal

bisnis yang lebih bagus untuk PT Inuki, sehingga mereka tidak perlu kebebanan **over cost** dan bisa segera sehat kembali.

Kemudian yang terkait dengan ekosistem apa riset dan inovasi, kemudian vaksin merah putih, vaksin merah putih itu masih terus berlanjut dan memang saat ini sudah ada di Biofarma dan sudah tidak riset di kami dan memang kami sedang menunggu kesepakatan dengan Biofarma terkait dengan pendanaan untuk uji praklinis dan uji klinisnya. Karena bagaimanapun juga vaksin ini masih sangat diperlukan, apalagi kita belum tau ini pandeminya masih berlanjut meskipun relatif sudah mulai bisa dikontrol, tetapi kami melihat bahwa dan semua Kementerian Kesehatan sudah melihat bahwa apa vaksin itu masih sangat diperlukan kedepannya.

Jadi, tetapi untuk penjelasan lebih detail akan kami sampaikan secara tertulis terkait apa, apa yang sudah kami lakukan dan kendala apa sebenarnya yang dialami oleh misalnya Biofarma, sehingga Biofarma tidak bisa dengan cepat melakukan produksi terbatas untuk uji praklinis dan klinis tersebut.

F – PKS (Ir. H. TIFATUL SEMBIRING):

Interupsi, Pak Ketua.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Silakan, silahkan.

F – PKS (Ir. H. TIFATUL SEMBIRING):

Jadi Pak. Jadi pertanyaan Bu ini ya Bu Andi itu, ini lanjut ga ya merah putih, ini pertanyaannya itu belum dijawab, Bapak.

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (Dr. LAKSANA TRI HANDOKO, M.Sc.):

Ya, masih berlanjut, Bapak. Bahkan kami juga melakukan, karena selama ini kan belum pernah ada tim periset yang pengalaman bikin vaksin manusia dari, di Indonesia ya Pak dari *skrect*. Jadi sekarang temen-temen malah sudah lebih pede sehingga mereka mengembangkan berbagai vaksin yang lain juga, seperti misalnya PP untuk HPP dan sebagainya.

F – PKS (Ir. H. TIFATUL SEMBIRING):

Ya maksudnya ini ada Bu Andi, pertanyaan Bu Andi tadi kan apakah teman-teman yang dulu dari dulu sudah meriset vaksin merah putih itu lanjut gak itu program, program apa yang tadi kan, dan sampai sejauh mana sekarang. Kemarin kan sempet heboh juga itu, itu aja singkat.

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (Dr. LAKSANA TRI HANDOKO, M.Sc.):

Ya kalau-kalau teman-teman ex Eijkman itu semua sudah bergabung di pusat riset biologi molekuler Eijkman yang ada di Cibinong saat ini Pak dan mereka masih melanjutkan, bahkan sebagian bergabung ke, kami sekarang ada pusat riset khusus vaksin dan obat. Jadi yang vaksin itu hampir semua bergabung ke pusat riset vaksin itu bersama dengan teman-teman yang lain yang dari BPPT dan dari LIPI juga.

F – PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc):

Pak, ini kan saya tahu tahapan-tahapan. Izin, Pimpinan. Tahapan vaksin, ini udah sampai tahap uji klinis keberapa gitu loh Pak, ini kan sudah satu tahun lebih sejak tahun lalu, udah sampai uji klinis ke berapa gitu loh.

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (Dr. LAKSANA TRI HANDOKO, M.Sc.):

Mohon izin, Pimpinan.

Tadi sudah saya sampaikan Ibu Andi, jadi bahwa saat ini itu bibit vaksin itu sudah, sudah ada di Biofarma, sehingga sudah bisa dan siap untuk, karena sudah memenuhi standar industrinya, izin ya maksudnya, kalau dulu kan masih terlalu rendah di atas 600 sekarang dan itu sudah siap untuk di uji, di produksi terbatas untuk uji pra klinis dan uji klinis.

Tetapi *problem*-nya memang jadi dan itu yang sebenarnya kami akan bantu selesaikan juga, bahwa tidak mudah bagi industri seperti Biofarma untuk menghentikan *regular production line* nya itu, yang besar itu untuk apa memproduksi terbatas, karena dia harus menghentikan, harus membersihkan, kemudian sertifikasi ulang ke BPOM, memproduksi terbatas, nanti selesai itu harus dibersihkan lagi, di sertifikasi lagi untuk balik ke produksi yang sebelumnya sehingga itu bisa makan waktu 4-6 bulan dan cukup ada *potential loss* di mereka.

Itu sebabnya kami sekarang itu menyediakan CGMP-nya. Jadi kami sedang membangunkan CGMP yang memang untuk diproduksi terbatas, yang kecil, yang nanti bisa dipakai industri farmasi siapa saja kalau apa ada yang tertarik untuk mengembangkan vaksin ini, vaksin itu, dan sebagainya gitu.

Jadi itu sebenarnya problem lama, Bu Andi. Sejak awal pandemi sebenarnya kami sudah mengetahui potensi problem tersebut gitu, termasuk yang untuk apa yang *animal* BSL-3 yang untuk Makata yang untuk monyet yang besar, yang untuk uji prakilis fase 2 itu juga praktis di Indonesia sudah tidak ada itu. Jadi itu sudah, sedang kami bangunkan itu *inshaa* Allah bulan Oktober ini sudah, sudah bisa *running* dipakai. Yang *animal* BSL-3 yang Makaka, Bu.

Jadi kalau yang vaksin BUMN misalnya itu sedang uji praklinis *ani* apa itu *animal* BSL-3 itu yang mencent. Jadi fase 1 itu ada di tempat kami juga, kalau itu sudah ada dari awal, sedangkan yang fase 2, itu yang perlu, yang Makaka, yang monyet yang besar, sebelum boleh di uji cobakan ke manusia. Jadi itu yang kami sediakan juga sekarang gitu.

F – PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc):

Kan kalau peneliti kan kita punya *time table* ini apa, ini apa, ini apa. Saya minta dong Pak secara tertulis untuk vaksin merah putihnya untuk *time table*-nya, supaya kita *monitoring*.

Karena kita pernah ke Biofarma, Biofarma kayanya juga engga serius untuk mengembangkan Vaksin Merah Putih, dia Vaksin BUMN yang dia prioritas.

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (Dr. LAKSANA TRI HANDOKO, M.Sc.):

Ya saya tidak.

F – PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc):

Terus tapi Bapak punya pusat vaksin sendiri, kenapa, maksud saya harus di *endorse* nih Pak, karena bayangkan kalau kita beli vaksin setiap tahun di luar vaksin untuk virus corona ya Covid, itu 24 triliun kita keluarkan, kenapa kita engga mau mandiri gitu loh vaksin ini.

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (Dr. LAKSANA TRI HANDOKO, M.Sc.):

Jadi kalau fasilitas kami udah jadi Ibu, itu yang memang akan kami buka untuk semua industri farmasi. Jadi kami tidak, tidak memilih lagi siapa yang tertarik, apa itu BUMN atau bukan itu tidak masalah. Jadi siapa yang memang ingin masuk ya akan kami fasilitasi.

Karena memang untuk proses uji itu memang harus pelaku usaha, harus industrinya yang maju di BPOM tidak bisa kami, itu sebagai lembaga riset tidak bisa itu harus, untuk izin edar, izin itu harus pelaku industri, jadi, sehingga kami sekarang menyediakan fasilitas-fasilitas yang pelaku industri bisa pinjam gitu, jadi tanpa harus mengganggu *production line* mereka, kurang lebih seperti itu strategi kami, Bu.

F – P. NASDEM (RICO SIA):

Izin, Pimpinan.

Mungkin waktunya perpanjang dulu ya.

**KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/
WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Ya, saya perpanjang waktunya jadi tadinya kan 12.45 saya tambah jadi 13.15.

(RAPAT: SETUJU)

**KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (Dr. LAKSANA TRI
HANDOKO, M.Sc.):**

Mohon izin untuk.

**KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI
PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Silahkan dilanjut, Pak.

**KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (Dr. LAKSANA TRI
HANDOKO, M.Sc.):**

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

Kemudian terkait dengan dugaan mal administrasi yang disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia pada awal Juli itu sudah kami tindaklanjuti, kami respon tanggal 6 Juli dan setelahnya itu juga telah dilakukan pertemuan untuk klarifikasi secara langsung terkait dugaan administrasi yang dilayangkan oleh Ombudsman Republik Indonesia.

Pada intinya adalah kalau dari sisi saya itu memang ada *miss* informasi, karena sebenarnya periset yang dialihkan ke BRIN itu basisnya adalah keinginan, harus keinginan yang bersangkutan yang ditunjukkan dengan surat pernyataan bermaterai dan sebelum itu ada, BKN tidak akan memproses itu. Jadi dalam hal ini yang memproses adalah BKN. Jadi tidak ada satupun yang BRIN bisa memproses sebenarnya, karena pihak yang berwenang itu Menpan-RB melalui BKN, itu kalau untuk mutasi pegawai. Baru setelah mereka diproses oleh BKN dan saya lantik dan pada saat itulah menjadi tanggung jawab kami di BRIN.

Jadi sebelum, sebelum proses pelantikan itu terjadi, mereka itu masih menjadi tanggung jawab dari K/L masing-masing. Jadi memang saya tahu di beberapa K/L itu ada memang apa ya, oh ini kan mau pindah jadi tidak begitu di urus misal dan sebagainya, tetapi tentu kami tidak bisa masuk ke ranah tersebut karena itu masih menjadi domain mereka.

Sedangkan untuk terkait pengalihan aset, itu melalui DJKN Kementerian Keuangan. Jadi bukan kami juga. Pada intinya tidak mungkin BRIN itu melakukan pengalihan gitu, kami itu sifatnya hanya menerima begitu. Kemudian juga program itu oleh Bappenas dan anggaran itu oleh DJA Kementerian Keuangan.

Jadi itu sebabnya sampai sekarang pun kami menerima gitu, jadi dan untuk SDM kami sudah selesai dan yang terakhir kemarin itu tanggal 24 Agustus yang baru saya lantik, itu karena apa yang jenjangnya ahli utama memang harus dengan Keppres. Jadi memang kami harus menunggu Keppres dari Sekneg. Jadi setelah Keppres saya terima baru saya bisa melantik dan pada saat itulah menjadi urusan kami semua mereka itu.

Jadi intinya seperti itu, sehingga apa dugaan mal administrasi yang disampaikan itu kalau dari sisi kami yaitu memang agak salah alamat, karena seharusnya itu menjadi masih jadi domain K/L masing-masing.

Kemudian ya yang terkait dengan program strategis nasional salah satunya adalah *bona male*. Jadi memang sejak proses, sejak pembentukan tim di awal saya sudah melakukan dengan tim evaluasi seluruh program, seluruh program di, di 5 entitas. Jadi itu Kemristek BRIN, apa BATAN, BPPT, LAPAN, dan LIPI, karena kami, karena kami komunitas di situ, sebenarnya kami sudah tau bagian yang cenderung *overlapping* sehingga kami harus menata ulang bagaimana meng apa mengintegrasikan program-program yang *overlapping* tersebut.

Jadi misalnya contoh kasus itu seperti **bona male**. Nah **bona male** itu sebenarnya kalau di LAPAN itu sebenarnya ada pusat, pusat apa riset teknologi penerbangan. Jadi sudah pasti itu apa *overlapping* dengan yang di **bona male** yang ada di BPPT misalnya, sehingga pada saat itu kita jadikan satu bagaimana nih **bona male** nya.

Nah, pada saat itulah, pada saat evaluasi itulah kami apa tim ini bersama kami itu melihat memang ada beberapa problem yang cukup krusial. Nah problem yang cukup krusial itu pertama terkait dengan teknologi kunci, yaitu *machine system*, kemudian motor dan platform. Jadi platform itu memang dibuat di PTDI, sedangkan *machine system* itu dibeli dari perusahaan Makeline yang ada di Spanyol dan motor itu dari Italia, salah satu perusahaan di Italia.

Nah yang problem adalah itu sendiri-sendiri, sehingga pada saat itu di, di apa diintegrasikan itu pada saat itu tim sudah melihat, wah ini potensi masalah karena ukurannya berbeda ini beratnya dan seterusnya begitu. Nah, pada saat itu sebenarnya tim sudah menyampaikan agar dilakukan uji secara bertahap.

Jadi ada uji statis yang dia motor dinyalakan, kemudian sampai berapa jam sesuai dengan standar penerbangan gitu karena semua sudah ada standarnya, tetapi karena saat itu teman-teman **bona male** itu menyampaikan wah ini sudah ada DIPAnya, kita harus segera uji terbang karena janjinya waktu itu Agustus misalnya.

Nah, dengan berat hati karena waktu itu saya belum pegang **DIPA nya** jadi yang ya silahkan, tapi resiko karena ini kan pesawat besar 16 meter, sehingga kalau jatuh itu bahaya sekali bisa menghancurkan rumah misalnya,

sehingga itu diputuskan di pamengpeuk dan itu dilakukan di bulan Desember dan ya ternyata memang tidak bisa terbang gitu.

Pada intinya itu tidak bisa terbang, jadi sudah di *runway* tetapi tidak bisa terbang dan malah apa itu, malah nyungsep sehingga berakibat sebagian komponen itu rusak gitu. Nah, pada saat komponen rusak itu ya semua dilaporkan kembali ke saya pada Januari saya sampaikan wah ini enggak bisa, ini harus dilakukan evaluasi ulang gitu.

Nah, pada saat evaluasi ulang itulah dengan termasuk dengan Makeline, Makeline-nya menyampaikan bahwa mereka tidak berkenan membuka teknologi *machine system* itu, karena kita hanya statusnya hanya membeli bukan *for development*, nah itulah yang saya sampaikan walau begini kita sama sekali tidak, tidak ada risetnya gampang aja begitu. Jadi kita tidak ada teknologi kunci yang bisa kita pegang, tidak bisa bikin paten dan sebagainya, sehingga kita tidak mungkin apa memakai sistem yang sama gitu.

Nah, karena *machine system* itu ada bagian yang paling sulit, jadi akhirnya kami bersepakat untuk Puna itu, pesawat nir udara itu tidak, jangan kombatan dulu dan kami bersepakat juga dengan Kementerian apa tim Kemenko ekonomi sebagai penanggungjawab PSM dan juga di Kemhan kita masuk ke ESR. Jadi ESR itu untuk *surveillance* karena itu lebih simpel, kalau-kalau kombatan itu dia harus menembakkan sesuatu, kalau nembak itu pasti ada mundurnya sehingga kalau kita tidak menguasai *mission* sistemnya berpotensi jatuh, jadi berbahaya sekali sehingga lebih baik pilot nya diganti yang semacam radar, kamera atau itu kebutuhan itu besar untuk pemetaan, termasuk ke BIG dan sebagainya sehingga kita, kami arahkan *guna* ini ke ESR dulu.

Nanti kalau ESR sudah dikuasai *mission* sistemnya, barulah kita coba masuk ke pilot yang ada senjata. Kurang lebih seperti itu kalau terkait *bona male*. Jadi yang apa yang, yang lainnya sebetulnya problemnya serupa. Jadi intinya, penguasaan teknologi kuncinya itu yang, yang belum ada, tidak terjadi, sehingga kita kesulitan pada saat melakukan lisensi dan sebagainya.

F – PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc):

Ketua, bukan karena BPPT ya Bapak hancurkan semuanya ya.

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (Dr. LAKSANA TRI HANDOKO, M.Sc.):

Tidak Ibu, kan saya juga BPPT sampai 2022 saya masih di, ya justru kami ini kan ingin mencari yang bagus Bu, sulit, karena kami kan ingin ada sesuatu juga gitu. Kalau memang bagus ya kenapa tidak ya. Jadi, misalnya yang pome itu bagus Bu, yang pome, yang biogas yang dimana itu yang di Riau itu bagus ya, jadi kita apa BPTN bisa langsung melisensikan. Yang arsinum kan sekarang juga sudah dimasukkan e-katalog kami lisensikan juga, sehingga kalau ada permintaan dari Dapil akan lebih mudah sekarang gitu. Jadi apa tidak perlu ada proses lelang karena nilainya cukup besar misalnya gitu.

Jadi, kemudian apa yang terkait garam industri juga serupa. Jadi yang garam industri itu juga sama. Jadi sebenarnya poin-poin ini sudah disampaikan juga di wartawan Kompas sehari setelah nanti sudah debut dan sudah dimuat di Kompas juga sebagai apa informasi dari mereka, informasi pembandingan dari Kompas maksudnya.

Nah terkait dengan BRINDA. Jadi tentu pembentukan BRINDA itu kami harus dengan Kemendagri, karena seluruh aspek perangkat pemerintah daerah itu menjadi ranahnya Kemendagri dan justru Kemendagri yang mengajak kami dan proaktif, sehingga saat ini kami sudah menyelesaikan bersama tim Kemendagri rancangan peraturan Mendagri perubahan, perubahan nomenklatur untuk litbangda menjadi BRINDA.

Jadi pada prinsipnya Kemendagri mendorong litbangda, yang sudah dapat litbangda langsung bisa di konversi ke BRINDA, termasuk juga NPSK. NPSK itu semacam norma dan standar untuk pembentukan apa ini unit di daerah dan itu juga sudah diselesaikan. Jadi Kemendagri meminta juknisnya menjadi Peraturan BRIN, sedangkan peraturannya Peraturan Mendagri.

Jadi yang sudah terbentuk itu sepenuhnya itu adalah legal dan memang harus sepersetujuan Kemendagri. Jadi, BRIN sifatnya hanya memberikan rekomendasi. Jadi Kemendagri selalu meminta rekomendasi BRIN, setelah itu baru mereka telaah, setelah itu baru ke DPRD dan sebagainya.

Nah untuk terkait rekomendasi tersebut, jadi BRIN selain sudah membuat NPSK dengan Kemendagri, salah satu yang paling penting yang mungkin Bapak/Ibu ketahui adalah apa kalau yang sudah dapat di Balitbangda pasti sudah setuju langsung, karena kesepakatan Kemendagri seperti itu yang sudah dikonversi, tapi yang belum ada Balitbangda itu apa PAD-nya yang harus sangat baik. Jadi kalau yang PAD-nya kurang itu oleh Kemendagri biasanya tidak bisa disetujui, batasannya sebenarnya hanya itu saja.

Kemudian, ya mungkin kami, saya kira dari kami sementara itu dulu Bapak Pimpinan, untuk lebih detailnya, kami akan sampaikan dalam bentuk tertulis dan segera kami sampaikan ke Bapak/Ibu Komisi VII yang kami hormati.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI
PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Terima kasih, Pak Kepala BRIN.

Dilanjutkan oleh Kepala BIG mungkin untuk menjawab.

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (MUH ARIS MARFAI):

Terima kasih.



Bapak Pimpinan dan Bapak, Ibu Anggota Komisi VII,

Yang pertama untuk Pak Hendrik. Terima kasih, Pak. di Dapil Bapak sebetulnya kami sudah melakukan pembinaan untuk kabupaten/kota, terutama Kota Medan dan provinsi dalam hal simbol jaringan dan kami juga siap sosialisasi bersama Bapak, nanti kita akan diskusikan setelah ini agar bisa kita laksanakan sebelum akhir tahun, karena kita tidak kemungkinan bisa diselesaikan di bulan September atau Oktober, nanti mohon waktu Bapak untuk.

Kemudian untuk kesepakatan batas tadi dari Pak Bambang Fraksi Partai Golkar. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yang pertama 12 kesepakatan batas negara itu mencakup beberapa hal antara lain yaitu, kita menyepakati metode dan kriteria survei lapangan dan pemrosesan batas. Kemudian juga, kita sudah menyepakati nilai koordinat untuk titik referensi yang digunakan, terutama antara RI – Malaysia dan RI – Timor Leste.

Kemudian juga menyepakati penyelesaian *Outstanding Boundary Problem* atau OBP, ini yang sudah kita laksanakan di RI – Malaysia, yaitu di Sebatik dan Sinepat dan juga.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Saya kasih masukkan sedikit Pak, ini kan 12 kesepakatan ini bisa. Tadi kan dalam paparan tadi tidak ada.

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (MUH ARIS MARFAI):

Hanya kita sebutkan 12 kesepakatan, Pak.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Itu rincian itu boleh dikasih ke kita aja biar anggota bisa lihat nanti di *print out* dibagikan ke anggota, karena itu penting bagi kita, karena kita ini kan juga masuk di dalam landasan kontinen ini kita, ini kita juga perlu. Ini beberapa anggota Komisi VII juga masuk di dalam proses landasan kontinen tadi.

Terima kasih.

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (MUH ARIS MARFAI):

Siap, Bapak Pimpinan. Nanti akan kita sampaikan secara tertulis untuk detailnya. Mohon izin untuk melanjutkan.

Kemudian terkait dengan penetapan batas desa, sebetulnya BIG dalam hal pemetaan batas desa ini berperan untuk penegakan, penegasan batas desa yaitu menyediakan batas desa indikatif yang kita lakukan dari citra satelit

dan ini sudah selesai di 2019, namun batas desa indikatif ini perlu di *follow up* lebih lanjut.

Kemudian kita juga menyediakan data dasar untuk penegasan batas desa yang berupa peta dasar dan citra satelit, kemudian menyediakan peta kerja bagi Pemda, karena untuk batas desa yang melaksanakan adalah Pemda.

Kemudian melakukan verifikasi batas desa yang akan ditegaskan Pemda melalui peraturan bupati maupun peraturan walikota. Kemudian penegasan batas desa ini dilaksanakan oleh pemerintah daerah sendiri melalui penerbitan perbub atau perwalkot tadi.

Kemudian untuk Kemendagri, ini berperan melakukan penetapan dan penegasan batas daerah untuk level kabupaten/kota dan provinsi, dan dalam penegasan batas desa Kemendagri tidak melakukan penetapan dan penegasan batas desa karena ini merupakan wewenang Pemda. Kemendagri dan kami di BIG ini mengkoordinasikan untuk melakukan pembinaan dalam penyelesaian batas desa tadi.

Secara lebih lanjut BIG dan Kemendagri telah berkoordinasi untuk melaksanakan percepatan penegasan batas desa, ini sesuai dengan amanah Perpres 23 2021 tentang kebijakan satu peta. Kemudian untuk batas teritorial dengan negara tetangga, untuk batas darat sebagian besar batas darat dengan negara tetangga ini sudah disepakati, hanya menyisakan beberapa *Outstanding Boundary Problem* yang belum sepakat, yaitu diantaranya ada 7 OBP, 3 OBP di sektor timur dan 4 OBP di sektor barat. Telah disepakati 3 OBP di sektor timur, termasuk di Sebatik dan menyisakan 1 OBP di Sinapat yang akan dilakukan survei bersama di tahun 2022 ini dan 2023. Kemudian untuk 5 OBP di sektor barat ini sebetulnya relatif kecil dan penyelesaiannya menunggu selesainya OBP di sektor timur, yaitu di sektor Sinapat.

Kemudian hubungan antara RI dan Timor Leste ini menyisakan 2 OBP di Nulbesi dan Bijo Sunan, dan ini akan dilaksanakan pertemuan antara Menkopolkam dengan Xanana di bulan September 2022. Nah, kita menunggu hasil dari pertemuan tersebut.

Kemudian di bejul sunan ini sudah disepakati secara teknis sebenarnya, tinggal diterapkan dan/atau tinggal ditetapkan dalam *professional agreement*. Sementara itu untuk batas laut, sebagian batas laut teritorial ini sudah definitif atau sudah disepakati. Segmen yang belum ini hanya tinggal antara RI – Malaysia, ini antara segmen selat Singapura bagian timur, segmen Laut Sulawesi, segmen laut Cina Selatan yaitu di Tanjung Datu. Kemudian untuk RI – Timor Leste ini belum disepakati karena menunggu penyelesaian yang batas darat yang di Nulbesi tersebut.

Kemudian untuk RI dengan PNG, ini sudah selesai 100% di 2019. Hanya saja kita tinggal melakukan perapatan pilar Bapak, karena yang selama ini sudah ada itu pilar utama interval 20 kilometer, masih sangat jauh sekali, dan kita akan merapatkan pilar itu untuk interval 2 meter sampai dengan selesai.

Kemudian untuk poin yang terakhir aplikasi yang bisa digunakan atau diakses oleh masyarakat, ini ada yaitu ada bio portal atau *tanahair.big.co.id* dan ini merupakan *single windows* untuk mengakses informasi geospasial yang dimiliki tidak saja di BIG, tapi oleh Kementerian/Lembaga dan Pemda, karena semuanya *input* disana, sehingga tinggal satu *side* bisa kita melihat ke seluruh informasi geospasial di Kementerian dan Lembaga terkait.

Demikian Bapak Pimpinan dan Bapak/Ibu anggota Komisi VII yang kami hormati.

Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

**KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/
WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Terima kasih, Pak Kepala BIG.

Dilanjutin oleh Kepala BAPETEN, silahkan.

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (SUGENG SUMBARJO) :

Terima kasih, Pimpinan.

Ada beberapa pertanyaan yang ke BAPETEN, yang pertama mungkin yang kita tanggapi adalah mengenai perbaikan laporan keuangan. Kami sangat berterima kasih atas saran dan arahan yang diberikan kepada kami. Kami berusaha untuk membuat sistem yang transparan. Dari 3 temuan BPK yang ada adalah terkait dengan administrasi BMN, kami akan mengadakan sensus BMN secara keseluruhan melalui sistem *online*. Jadi ini akan, BPK menghendaki bahwa setiap BMN itu melekat kepada pegawai, seperti contoh adalah laptop, dan PC atau hal-hal yang lainnya itu harus jelas siapa yang memegang, kemudian sistem perpindahannya peralihan semua dilaksanakan dengan baik, itu sedang dikembangkan dan segera kami laksanakan sensus BMN tersebut di tahun ini.

Kemudian yang kedua tadi mengenai potensi atau cadangan uranium yang ada di Indonesia. Mohon maaf kami, BAPETEN sebenarnya tidak melaksanakan langsung adalah BATAN waktu itu atau BRIN, tapi dari laporan yang disampaikan kepada kami cadangan itu sekitar 81.000 ton itu cukup, cukup sekali jika kita membuat **NTM**.

Kemudian untuk cadangan autoriumnya itu ada 140.000 ton. Nah, autorium itu juga terkandung di dalam limbah tambang timah itu benar. Jadi untuk saat ini untuk limbah tambang timah maupun tambang-tambang yang lainnya itu kami kelola dalam bentuk namanya NORM atau *Naturally Occurring Radioactive Material* ini mereka harus menyimpan selama mungkin dengan pengawasan dari BAPETEN, jadi kami mengawasi untuk itu. Sampai teknologi untuk pemisahannya itu sudah ekonomis, jadi ada ekonomis. Sekarang sudah ada, tapi masih mahal, belum ekonomis.

Yang kedua juga NORM ini tidak hanya autorium Bapak,/Ibu sekalian, tetapi juga ada material panas jalan yang sangat mahal atau sangat berguna untuk pengembangan teknologi, terutama untuk pembuatan elektronika **SIP** *Chip* dan sebagainya, mikro *processor* itu dipakaikan.

Nah untuk pemanfaatannya, untuk uranium itu juga akan digunakan untuk PLTN, sedangkan antorium itu juga sudah ada beberapa vendor atau ada beberapa pihak yang berminat untuk mengembangkan PLTN untuk *small medium reactor* untuk *SMR* yang dayanya mungkin di bawah 100 megawatt gitu untuk antorium.

Nah, saat ini BAPETEN mengakomodasi permohonan tersebut, tetapi kami mengharapkan bahwa desain untuk SMR ini harus melalui tahap riset, terutama dengan BRIN atau dengan BATAN, kemudian juga ada, ada fase untuk demo, demotasi. Jadi sebelum disambungkan dengan BRIN mereka harus melakukan demo apa ya demo *plan* dulu, itu yang kami harapkan sehingga penempatan antara uranium dan antonium itu juga bisa digunakan sebaik-baiknya.

Pak Bambang, kami siap untuk Jabar VIII ya Pak ya, Jabar VIII, siap Pak, kami nanti akan hubungi TA Bapak. Terima kasih.

Pak Hendrik, terima kasih. Untuk sistem informasi pengawasan ini yang persuasif ini, kami buat yang pertama adalah melibatkan Dinkes, jadi untuk pengawasan rumah sakit. Jadi kami itukan semua hanya Jakarta dan pasien kami tidak mampu kalau setiap tahun harus ke daerah. Jadi ada sebagian yang, yang sudah baik, fokus kami inspeksi adalah yang belum memenuhi syarat, yang memenuhi izin, sedangkan sudah memenuhi kami berikan ke, bukan diberikan, tapi agar kami titipkan kepada Dinkes untuk mengawasinya, karena Dinkes juga melakukan inspeksi yang sama tapi udah secara keseluruhan.

Kemudian yang kedua, kami juga bekerja sama dengan Polda, yaitu dari Polri, jika ada pol pengguna yang tidak memiliki izin. Jadi kami punya data yang disampaikan ke kepala Polda, kami sudah memiliki MOU dalam rangka penegakan hukum dengan kepolisian dan juga dengan Polda-Polda.

SOP sudah kami kirimkan kepada para Polda, sehingga polisi di daerah sudah tau jika ada hal yang tidak sesuai itu mereka harus melakukan apa dan bagaimana itu sudah kami sepakati SOP-nya.

Yang ke berikutnya, selain Kemenkes, Dinkes, itu kami juga menggandeng Pemda, dan yang lebih penting lagi adalah masyarakat. Jadi hasil inspeksi itu kami *publish* dalam bentuk hasil seperti merah, hijau, kuning, biru, sehingga masyarakat bisa mengetahui dengan baik bahwa satu rumah sakit atau industri itu memenuhi persyaratan atau tidak.

Kemudian juga **...(suara tidak jelas 02.34.32)** kami untuk koleksi dengan para Lembaga uji, sehingga alat-alat tersebut itu sertifikat uji layaknya itu dapat kita validasi itu dari langsung dari pihak ketiga. Itu yang kami maksudkan dengan sistem masif pasif.

Kemudian juga para pengguna itu bisa melaporkan setiap saat, sehingga antara pengawas dan pengguna itu setiap saat bisa berkomunikasi melalui sistem yang kami buat tersebut.

Demikian, terima kasih.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Terima kasih.

Saya pikir udah cukup, nanti penjelasan lebih detail boleh dikirimkan ke kami melalui tertulis.

Bapak/Ibu sudah cukup kita masuk ke dalam kesimpulan ya. Boleh Bapak/Ibu? Lanjut ya. Draf nya boleh tolong ditayangkan kesimpulan kita yang ke 2021 dulu.

Oke kita masuk ke, draf kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Kepala BRIN, Kepala BAPETEN dan Kepala BIG, Kamis, 25 Agustus 2022.

1. Komisi VII DPR RI mendesak BRIN untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja keuangan, yang mana pada tahun 2021 memperoleh opini wajar dengan pengecualian atau WDP;

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

2. Komisi VII DPR RI mendapat, dapat memahami penjelasan Kepala BRIN terkait opini WDP yang diperoleh Kementerian BRIN atau BA-080 terkait catatan persediaan dan tidak lengkap pada set, satker di Deputi Riset dan Pengembangan serta LIPI, BA-079 terkait penggunaan PNBK senilai 4,2 miliar yang langsung dibelanjakan untuk pengujian virus;

Setuju ini?

F – PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc):

Ini, izin Pak.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Silahkan.

F – PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, MSc):

Sampai di situ setuju, cuman tadi ada 30, 14 temuan, kita minta kemudian dilanjutkan atau boleh kesimpulan nomor berikutnya, meminta BRIN untuk menyampaikan secara tertulis rekomendasi, apa namanya tindak lanjut dari temuan BPK, 14 temuan BPK di 2021.

KETUA RAPAT:

Itu aja Bu, Bu Andi.

F – PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, MSc):

Iya.

**KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/
WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Oke, saya ketok dulu yang satu supaya nanti masuk ke poin 3 ya, yang poin 2 saya ketok dulu ya. Oke yang poin 2 saya ketok dulu, saya ulang ya.

2. Komisi VII DPR RI dapat memahami penjelasan Kepala BRIN terkait opini WDP yang diperoleh Kemenristek BRIN atau BA-080 terkait catatan persediaan yang tidak lengkap pada satker di Deputi riset dan pengembangan serta LIPI, BA-079 terkait penggunaan PNBPN senilai 4,2 miliar yang langsung dibelanjakan untuk pengujian virus;

**KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (Dr. LAKSANA TRI
HANDOKO, M.Sc.):**

Mohon izin, Bapak Pimpinan.

Nomor 2 kalau boleh ditambahkan, memakai rekening penampungan lainnya setelah virus itu. Rekening penerimaan lainnya mohon maaf.

**KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/
WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Menggunakan rekening penerimaan lainnya ya bukan memakai ya, menggunakan rekening pemakaian eh penerimaan lainnya, oke ya setuju ya.

(RAPAT: SETUJU)

Yang ketiga.

Ini Bu Andi kata-katanya tadi apa nih,

3. Komisi VII DPR RI meminta Kepala BRIN untuk menyampaikan laporan tertulis terkait temuan BPK RI.

F – PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc):

Tindak lanjut terhadap 14 temuan BPK.

**KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI
PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Terhadap 14.

F – PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc):

Temuan BPK, artinya temuan BPK-nya 14.

**KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (Dr. LAKSANA TRI
HANDOKO, M.Sc.):**

Ada di mana, Bu?

**KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI
PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Yang tadi kita tadi Pak.

**KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (Dr. LAKSANA TRI
HANDOKO, M.Sc.):**

Eenggak, maksud saya karena 5 BA masing-masing ada temuannya
semua Bu, jadi.

F – PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc):

Ini kan BRIN, Pak. Jadi kan.

**KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (Dr. LAKSANA TRI
HANDOKO, M.Sc.):**

Oh yang Kemenristek BRIN.

F – PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc):

Iya.

**KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (Dr. LAKSANA TRI
HANDOKO, M.Sc.):**

Oh baik iya.

F – PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc):

Bapak yang menyampaikannya, kan yang membuat rekomendasi
tindaklanjutnya kan Kepala BRIN kan.

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (Dr. LAKSANA TRI HANDOKO, M.Sc.):

Iya semuanya Bu dari 5 entitas.

F – PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc):

Iya, makanya Bapak menyampaikan karena, karena di sini kan masih dalam proses 14 jumlah rekomendasi BPK 36, Bapak harus membuat tindak lanjut terhadap 36 rekomendasi BPK, temuannya 14 ini loh. Sama seperti ESDM apa temuannya, kemudian apa rekomendasi dia laporkan di satu tabel sendiri apa yang sudah mereka lakukan gitu loh tindak lanjut.

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (Dr. LAKSANA TRI HANDOKO, M.Sc.):

Nanti kami akan menyampaikan semua aja Ibu, karena masing-masing ada belasan semua lima-limanya.

F – PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc):

Itu Pak, karena seperti kemarin Kementerian SDM dia melaporkan satu-satu.

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (Dr. LAKSANA TRI HANDOKO, M.Sc.):

Enggak, kalau boleh tidak usah ditulis 14 karena tidak hanya 14 itu, kalau 14 saya bingung yang mana. Enggak, karena kami ada 5 BA dan masing-masing ada temuannya, ada belasan temuannya.

F – PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc):

Ya kalau, berapa temuan Pak, ada 100 temuan?

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Total temuan itu ada berapa, berapa coba.

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (Dr. LAKSANA TRI HANDOKO, M.Sc.):

Ada di setiap BA ada, Bapak.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Jadi ga usah disebut kali Bu, seluruh kali Bu.

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (Dr. LAKSANA TRI HANDOKO, M.Sc.):

Iya, yang 14 itu yang di LIPI Bu, yang di Kemristek ada.

F – PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):

Seluruh temuan BPK.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Semua temuan BPK, saya pikir ini jangan cuman, kan tadi ada, ada yang satu lagi LIPI ya.

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (Dr. LAKSANA TRI HANDOKO, M.Sc.):

Jadi ada 5, Bapak. Yang Kemristek itu ada, ada 13 misalnya, kemudian.

F – PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):

Pak lembaga semuanya sudah di BRIN.

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (Dr. LAKSANA TRI HANDOKO, M.Sc.):

Memang saya harus membuat tindak lanjut.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Oke, berarti kan yang di bawah BRIN ini harus, harus menjelaskan Pak ya. Jadi saya pikir kalau jumlah akan rancu nih, seluruh temuan BPK saya pikir itu aja Bu ya, seluruh temuan BPK kan sudah jelas itu, ada, ada, ada suratnya kan yang menyatakan itu.

F – PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):

Tanggal berapa nih kita terima laporannya, tanggalnya harus ada tuh tanggal misalnya 2 Agustus eh maaf 2 September atau apa.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Bapak minta wak, kira-kira berapa lama nih, Pak?

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (Dr. LAKSANA TRI HANDOKO, M.Sc.):

Kalau ini mohon waktu 2 minggu mungkin.

**KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI
PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Oke kita kasih lah waktu 2 minggu, enggak ada masalah. 2 minggu berarti tanggal berapa nih, sekarang tanggal 25, 25, tanggal 8.

F – PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc):

Kan begini Pak tanggal, kan 7 Bapak dipanggilkan, sebaiknya sebelum tanggal 7, Pak.

**KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI
PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Tanggal 7 itu dipanggil BPK-nya?

F – PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, MSc):

2023 kan kita bahas, kalau ininya engga jelas gimana mau bahas.

**KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI
PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Sebelumnya boleh, Pak ya?

**KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (Dr. LAKSANA TRI
HANDOKO, M.Sc.):**

Ya, boleh.

**KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI
PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Ya jadi kalau tanggal 8, tanggal 6 hari apa tuh, kita minta tanggal 6 Pak ya, tanggal 6 September oke?

**KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (Dr. LAKSANA TRI
HANDOKO, M.Sc.):**

Ya, baik.

**KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI
PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Oke, saya baca ulang ya.

3. Komisi VII DPR RI meminta Kepala BRIN untuk menyampaikan laporan tertulis terkait tindak lanjut terhadap seluruh temuan BPK RI paling lambat tanggal 6 September 2022;

Oke ya?

(RAPAT: SETUJU)

4. Komisi VII DPR RI memberikan apresiasi kepada BAPETEN dan BIG atas capaian kinerja keuangan tahun 2021 yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP;

(RAPAT: SETUJU)

5. Komisi VII DPR mendesak agar Kepala BRIN dan Kepala BAPETEN dan Kepala BIG menindaklanjuti seluruh temuan laporan keuangan tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya sesuai rekomendasi BPK RI dan menyampaikan hasilnya secara tertulis kepada Komisi VII DPR RI;

Ini sama nih dengan yang tadi.

F – PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc):

Pak satu aja, terus ditambahkan paling lambat tanggal 6.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya itu aja, berarti poin 3 dimasukin disamain poin 5 tinggal ditambihin aja ini. Poin 3 kita *drop* ya? Setuju ya poin 3 kita *drop*?

F – PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, MSc):

Ini kan kalau nomor 3 itu menyampaikan laporan tertulis secara terkait tindak lanjut, ada ga nomor 5 itu laporan tertulis, oke, oke, kalau gitu tiga dihapus, setuju.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Ya oke nomor 5 oke sama ya. Sekarang udah pindah ke jadi nomor, oke jadi barusan jadi nomor 4 ya. Jadi saya nomor 4 saya ketok ya, saya uca, saya ulang saya baca lagi nomor 4,

4. Komisi VII DPR RI mendesak agar Kepala BRIN, Kepala BAPETEN dan Kepala BIG menindaklanjuti seluruh temuan laporan keuangan tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya sesuai rekomendasi BPK RI dan menyampaikan hasilnya secara

tertulis kepada Komisi VII DPR RI paling lambat tanggal 6 September 2022;

Oke?

(RAPAT: SETUJU)

5. Komisi VII DPR RI meminta Kepala BRIN Republik Indonesia, Kepala BAPETEN, dan Kepala BIG untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan kepada Komisi VII DPR RI paling lambat tanggal 1 September 2022.

Oke?

(RAPAT: SETUJU)

Oke, kan tadi saya bilang intinya kesimpulannya ada 2. Ini tadi kesimpulan yang tahun anggaran 2021, sekarang kesimpulan mengenai progres tahun 2022 ya.

Draf kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Kepala BRIN, Kepala BAPETEN, dan Kepala BIG, Kamis, 25 Agustus 2022.

1. Komisi VII DPR RI mendesak Kepala BRIN, Kepala BAPETEN, dan Kepala BIG untuk meningkatkan sosialisasi dan koordinasi program kerja, khususnya kegiatan yang dampak, yang dampaknya dirasakan langsung bagi peningkatan dan kesejahteraan masyarakat;

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

2. Komisi VII DPR RI mendesak Kepala BRIN untuk segera melaksanakan hasil kesepakatan RDP tanggal 16 tahun 2022 terkait optimalisasi anggaran tahun anggaran 2022 sebesar 1,6, Rp1.627.207 juta, 200 juta yang diperuntukkan untuk kegiatan dari masyarakat antara lain:
 - a. Bantuan riset atau talenta dan inovasi barista;
 - b. Perusahaan pemula berbasis riset, TPBR;
 - c. Fasilitas inovasi akar rumput;
 - d. Fasilitas usaha mikro berbasis IPTEK;
 - e. Masyarakat Bertanya BRIN Menjawab;
 - f. Produk inovasi dan arsinum; danDan melaporkan hasil rapat ke Komisi VII DPR RI paling lambat tanggal 1 September 2022.

Jadi ini tadi yang tadi Pak untuk supaya lebih jelas, nanti dilaporkan kepada kami tanggal 1 September 2022, ya Bu Andi ya.

F – PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc):

Yang dimaksudkan laporan itu pengalokasian 1,6 ini walaupun saya punya catatan, ini biar didengar oleh semuanya.

Untuk Fumi dan GRI itu dilakukan program yang langsung dinikmati oleh masyarakat, itu setelah saya selidiki itu uang jalan, uang pendampingan yang kembali lagi kepada BRIN sebesar fasilitas usaha mikro berbasis IPTEK, fasilitas *grass innovation* itu nggak ada dampaknya untuk masyarakat selain uang jalan untuk Bapak-Bapak.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Oke jadi ini, ini yang jadi supaya mendetail nanti Pak Kepala BRIN, nanti ini jelas disampaikan ke kami, kami tunggu sampai tanggal 1 September 2022, oke Pak ya, setuju ya.

(RAPAT: SETUJU)

3. Komisi VII DPR RI meminta Kepala BRIN Republik Indonesia, Kepala BAPETEN dan Kepala BIG untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan kepada Komisi VII DPR RI paling lambat tanggal 1 September 2022.

Ini termasuk tadi yang masukan yang poin tadi beberapa pertanyaan dan juga Pak Kepala BIG saya mohon juga apa tadi yang 12 kesepakatan tadi Pak, kami butuh sekali itu juga buat bahan kami juga. Saya pikir cukup ya.

F – P. NASDEM (RICO SIA):

Mengingatkan saja, Pimpinan izin.

Yang tadi saya sampaikan bahwa, jangan sampai ada temuan lagi terkait dengan gedung tadi. Jadi diingat untuk dibuat dari sekarang, jangan sampai nanti terakhir baru keluar, diminta baru kita bikin, akhirnya jadinya apa wajar tanpa eh wajar dengan pengecualian lagi. Jadi akhirnya balik lagi Pimpinan malu, kita malu semua, ini pengawasannya gimana.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Terima kasih.

Oke, saya pikir cukup, kesimpulannya sudah dua-duanya kita sepakati, mudah-mudahan menjadi pegangan buat kita semua dari pihak kami DPR dan

juga Bapak/Bapak sebagai pelaksana, mudah-mudahan ini menjadi acuan dan mohon yang kami sampaikan tadi betul-betul bisa terlaksana Pak Kepala, yang terutama tadi memang secara krusial kita betul-betul fokus untuk apa yang bisa kita lakukan dari BRIN ini untuk kepentingan masyarakat atau untuk kepentingan rakyat.

Bapak/Ibu dan yang saya hormati,

Demikian pembahasan agenda Rapat Dengar Pendapat kita hari ini. Sebelum mengakhiri rapat, kami persilahkan kepada Kepala BRIN, Kepala BIG dan Kepala BAPETEN atau yang lainnya menyampaikan sambutan penutup, kami persilakan Bapak.

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (Dr. LAKSANA TRI HANDOKO, M.Sc.):

Mohon izin, Bapak Pimpinan mewakili juga dari Kepala BAPETEN dan Kepala BIG.

Jadi kami dari BRIN, BAPETEN dan BIG mengucapkan terima kasih atas masukan dan informasi, serta dukungan yang diberikan kepada kami, semoga ini bisa memberikan tambahan semangat untuk kami untuk menjadi lebih baik kedepannya.

Terima kasih kami kembalikan kepada Bapak Pimpinan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/
WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Kami sampaikan kepada Kepala BRIn, Kepala BAPETEN dan Kepala BIG beserta jajarannya atas kerjasamanya yang baik dalam rapat hari ini. kami atas nama Pimpinan Komisi VII DPR RI juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu anggota Komisi VII.

Akhirnya dengan mengucapkan *hamdalah*, Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Kepala BRIN, Kepala BAPETEN dan Kepala BIG pada hari ini saya nyatakan ditutup.



*Billahi taufik wal hidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**(RAPAT: SELESAI)
(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.23 WIB)**

a.n. Ketua Rapat
SEKRETARIS RAPAT,

**Dra. Nanik Herry Murti
NIP.196505061994032002**

